



WARTA ISEI

Sinergi dan Kolaborasi Pusat dan Daerah

Bersantana Kita



Volume 1 No. 2, Agustus 2024



9 773048 057008



ppisei_official



PP ISEI



<https://isei.or.id/>

WARTA ISEI

PENERBIT

Bidang Pengembangan Akademi,
Riset & Profesi Pengurus Pusat ISEI

PEMIMPIN UMUM

Perry Warjiyo, Ph.D.

PENANGGUNG JAWAB

Yoga Affandi, Ph.D.

KETUA DEWAN REDAKSI

Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec.

SEKRETARIS DEWAN REDAKSI

Dr. Yuvensius Sri Susilo, M.Si.

DEWAN EDITOR AHLI

Prof. Dr. Muhammad Firdaus, M.Si.

Prof. Dr. Christantius Dwiatmadja, M.E.

Yohanes B. Kadarusman, Ph.D.

Mario Rosario Wisnu Aji, M. Ec. Dev.

MANAJEMEN REDAKSI

Aviliani

Anika Faisal

Lisawati

REDAKTUR PELAKSANA

Firman Sihol Parningotan, M. Ec.

WAKIL REDAKTUR PELAKSANA

Jonathan Ersten Herawan, S.E., CFAP.

SEKRETARIAT

Nuni Purwahyuni, SIP

Efrilia Sukmagraha, SP.

Achmad Kusnadi

Suswanto

DAFTAR ISI

ISEI MENYAPA	01
Pengembangan Kompetensi Sumberdaya Insani Untuk Indonesia Emas 2045	03
Lecturer (Leader) as a Coach: Upaya Memberdayakan Gen Z	06
Penggunaan QRIS di Kalangan UMKM: Suatu Upaya Pelatihan dan Pendampingan	09
Tenaga Profesional Perempuan Semakin Banyak, Mengapa Kontribusi Pendapatannya Masih Rendah?	11
Sinopsis Buku ORCHESTRA: Bagaimana pengelolaan sumber daya manusia menginspirasi dalam menyatukan irama bisnis	14
Peran Kota Samarinda sebagai Daerah Mitra IKN	16
Pertumbuhan Ekonomi Melambat, Sulsel Terancam Keluar dari Top Ten Share Ekonomi Nasional	18
Orkestrasi Pembangunan Ibukota Nusantara untuk Indonesia	22
Dampak Sosial-Ekonomi 17 Titik Pembangunan di Kota Surakarta	25
Mengurangi Jawa Sentris: IKN sebagai Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi Baru di Indonesia	28
Menggapai Makan Siang Gratis yang Amanah, Efektif dan Efisien	31
Perekonomian Aceh Menuju Kesejahteraan Masyarakat	34
Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur	37
Menerawang Dimensi Etis Kebijakan Ekonomi Pemerintah Baru	39
Laporan Kegiatan ISEI	42
Statistik Ekonomi Nasional (SENAS)	56
Statistik Ekonomi Daerah (SEKDA)	57
Perkembangan Sektor Perbankan (PBKN) & Perkembangan Sektor Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiunan (PPDP)	60

Disclaimer:

Opini, laporan dan informasi yang dimuat dalam majalah ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi redaksi Warta ISEI.

ISEI MENYAPA

Selamat datang di edisi kedua WARTA ISEI. Redaksi fokus mengangkat tema pengembangan sumber daya manusia dan aktivitas ekonomi bisnis yang berdampak. Pertumbuhan ekonomi wilayah yang berkualitas dan pemberdayaan masyarakat seluruh lapisan, terutama generasi muda, adalah kunci untuk menciptakan kesejahteraan berkelanjutan dan mempercepat kemajuan ekonomi bisnis.

Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan sosial. Pengembangan sumber daya manusia yang sistematis dalam meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan pekerja dapat mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045 dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan. Generasi muda merupakan sumber daya manusia yang sangat potensial dalam menciptakan kemajuan masa depan. Pemberdayaan Gen Z melibatkan inspirasi dan pelatihan yang intensif untuk mengubah mereka menjadi pemimpin masa depan yang inovatif dan berdaya saing tinggi. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan partisipasi dan kontribusi mereka dalam sektor ekonomi untuk kesejahteraan yang lebih inklusif.

Orkestrasi bisnis yang berdampak melibatkan penggunaan teknologi digital diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing. Contohnya, adopsi teknologi seperti QRIS di kalangan UMKM dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam memenuhi preferensi generasi sekarang dan menghadapi persaingan global. Selain itu, meningkatkan partisipasi dan kontribusi perempuan dalam sektor ekonomi juga sangat penting untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih inklusif.

Pertumbuhan ekonomi wilayah sangat dipengaruhi oleh peran daerah. Kota dan kabupaten di wilayah Indonesia bagian barat, tengah dan timur dapat dijadikan mitra strategis dalam pembangunan. Dengan demikian, kita dapat mengoptimalkan potensi daerah dan mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dapat dicapai antara lain melalui suatu transformasi ekonomi hijau berkelanjutan. Melalui pengelolaan sumber daya alam yang bijak, kita dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang mendukung kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Kami berharap edisi kedua WARTA ISEI dapat memberikan wawasan, inspirasi dan informasi bagi semua pembaca untuk bersama-sama membangun kemajuan masa depan yang inklusif dan berkelanjutan. Selamat membaca!

Firman Sihol Parningotan, M.Ec.

Redaktur Pelaksana

✿ Dengan merangkul
berbagai komunitas
kita bisa tumbuh
tanpa batas. ✿

#BuktiBaktiBCA



Pengembangan Kompetensi Sumberdaya Insani Untuk Indonesia Emas 2045

Oleh **Dr. Ayi Ahadiat, S.E., MBA.**

Pengurus Pusat ISEI Bidang I

& Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Kerjasama dan TIK Universitas Lampung

Penguatan visi Indonesia 2045 dari perspektif pembangunan modal insan atau human capital development Indonesia dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah dalam rangka menuju Indonesia 2045 dengan visi Indonesia emas. Indonesia emas ditandai oleh SDM yang unggul baik secara kapasitas, kapabilitas, maupun dalam penguasaan teknologi. Sebagaimana kita ketahui, pencapaian impian dan visi Indonesia 2045 dibangun melalui empat pilar berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar berbangsa, bernegara, dan konstitusi. Pilar pertama adalah pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pilar kedua adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pilar ketiga adalah pemerataan pembangunan. Dan pilar keempat adalah pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Jika kita soroti Pilar Pertama, pembangunan manusia Indonesia melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tentu tidak akan terlepas dari bagaimana kecerdasan atau kepiawaian bangsa Indonesia menyambut peluang bonus demografi. Pada tahun 2030, merupakan puncak bonus demografi di mana penduduk usia produktif 15 sampai 65 tahun lebih banyak atau 70% dibandingkan penduduk non-produktif. Ini merupakan peluang untuk bertransformasi dan mengoptimalkan SDM, baik secara kuantitas maupun kualitas. Jika tidak dilakukan oleh pemangku kebijakan, maka yang terjadi adalah kutukan demografi.

Tulisan ini adalah upaya elaborasi perjuangan Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK), di mana saya juga aktif di dalamnya. Selain aktif di Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (ISEI), saya juga aktif di GNIK. Hingga kini GNIK menyusun roadmap Indonesia Kompeten 2030, yang dapat dipedomani oleh kalangan industri.

Diawali pada tahun 2021 dengan melakukan studi kualitas karakter kepemimpinan nasional kemudian melakukan deklarasi 300 HR leader. Berbagai upaya lain seperti *Pilot Project Broadcast*, kemudian

prototyping ASN Talent Academy. Pada tahun 2023, GNIK meluncurkan hasil studi kualitas karakter kepemimpinan nasional kemudian melakukan implementasi *Talent Academy* khusus untuk ASN dan juga telah berhasil membentuk PPK atau Perkumpulan Pejuang Kompeten dan menyusun ekosistem HR Indonesia.

Pada tahun 2024, melanjutkan *Talent Academy*, MSIB, MBKM, dan menyusun konsep strategi manajemen talenta untuk mencetak 100.000 Indonesia Kompeten. Selanjutnya, memperluas kolaborasi nasional dengan asosiasi industri dan di tahun 2024 ini akan diselenggarakan Indonesia Kompeten Summit. Pada tahun 2025, GNIK akan menyusun pedoman atau panduan manajemen SDM menuju puncak bonus demografi 2030, pemetaan sumber daya manusia dalam rangka mencapai Indonesia Kompeten 2030, dan menguatkan karakter profil pelajar Pancasila sebagai perangkat lunak.

Modal Insani Indonesia Masa Depan

Membangun Indonesia masa depan dari pilar pengembangan sumber daya manusia atau modal insan berarti mengupayakan bahwa manusia Indonesia akan memiliki desain di masa depan pada tahun 2045. Oleh karena itu, harus ada upaya sistematis terkait bagaimana kita menyiapkan sumber daya manusia dengan kompetensi keterampilan atau skill dan pengetahuan atau *knowledge* yang berorientasi pada masa depan. Hal tersebut tentu harus dilakukan secara inovatif dengan fokus pada topik-topik yang berorientasi masa depan seperti *AI, Blockchain, Robotics, Brand Capacity Development, Green HR*, atau pengembangan sumber daya manusia yang terkait dengan lingkungan hidup berkelanjutan. Topik-topik tersebut dapat dirajut dalam satu paket pengembangan sumber daya manusia. Semua ini ditujukan untuk persiapan Indonesia agar dapat memanfaatkan puncak bonus demografi 6 sampai 7 tahun yang akan datang, yakni 2030-2032, sehingga Indonesia dapat benar-benar berdaya saing.

Untuk mempersiapkan hal tersebut, beberapa

pertanyaan harus dijawab. Pertama, apakah pemimpin sebagai SDM puncak yang disiapkan oleh bangsa ini cocok untuk masa depan? Ini berarti pemimpin harus memiliki keterampilan leadership yang kuat, keahlian dalam pengelolaan modal insan yang fokus pada keberlanjutan, serta pemahaman bisnis yang kuat sehingga dapat mengambil keputusan dalam menavigasi dan merespons tantangan masa depan di dunia kerja masing-masing. Kedua, apakah pemimpin memiliki persepsi penguasaan secara detail terhadap teknologi dan kelincahan dalam profesionalitas? Ini bermakna bahwa penguasaan teknologi yang berkembang serta kemampuan adaptasi yang tepat dalam lingkungan kerja yang berubah sangat diperlukan. Ketiga, sejauh mana kemampuan pemimpin dalam membuat keputusan yang benar-benar berbasis data? Kemampuan menganalisis data HR dan menerjemahkan *insight* ke dalam aksi strategi bagi organisasinya sangat penting. Keempat, pemimpin berorientasi masa depan harus merupakan inovatif *problem solver*, yaitu mampu memecahkan masalah secara inovatif dengan adaptasi atau penerapan desain thinking dan pendekatan inovatif untuk mengatasi tantangan HR yang kompleks. Kelima, pemimpin masa depan harus merupakan pemimpin berkelanjutan dan pemimpin etis, yang memiliki komitmen untuk mempromosikan praktik-praktik etis secara berkelanjutan di dunia kerjanya.

Rekomendasi Strategi

Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) menjadi sangat krusial. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kompetensi SDM di Indonesia:

Pertama, Pendidikan Berkualitas yang Inklusif.

Peningkatan Kualitas Pendidikan melalui Reformasi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri 4.0 dan atau teknologi masa depan. Didukung dengan peningkatan kualitas SDM guru melalui pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi yang berkelanjutan. Pendidikan berkualitas yang inklusif bermakna akses pendidikan yang luas dan merata terjangkau secara mudah dan terjangkau secara biaya Artinya bahwa kebijakan regulator pemerintah harus memahami memastikan akses pendidikan setara bagi semua lapisan masyarakat bagi semua kelas sosial terlebih di daerah terluar terpencil yang kurang berkembang namun untuk yang kurang berkembang harus ada intervensi yang lebih intensif dibanding dengan daerah

yang memang sudah baik aktivitas terhadap pendidikan. Pendidikan berkualitas yang inklusif juga harus menjawab kebutuhan pembelajaran sepanjang hayat (*long life learning*) dan *self access* terhadap bahan pembelajaran itu harus didukung oleh ketersediaannya harus didukung oleh pemerintah dengan platform digital online sehingga *resource learning* itu betul-betul terjangkau kapan saja di mana saja dari oleh semua level atau lapisan masyarakat.

Kemudian pada titik pembelajaran *online* pembelajaran sepanjang hayat harus mendukung pendidikan berkualitas yang inklusif. Tentu pelatihan dan sertifikasi terus harus ditingkatkan secara berkala/ *di-update* serta terjangkau untuk memastikan standarisasi pendidikan yang berkualitas dan inklusif di Indonesia berstandar global.

Kedua, Pengembangan Karakter dan Kepemimpinan.

Pengembangan kepemimpinan yang berkarakter didukung oleh nilai-nilai budaya, etika, dan integritas Indonesia, serta tanggung jawab dan religiusitas yang tinggi. Kepemimpinan yang dikembangkan ini harus berkarakter dan sesuai dengan kebutuhan masa depan yang inovatif dan visioner. Hal ini didukung oleh muatan seperti *desain thinking*, kemampuan memecahkan masalah (*problem solving*), serta pengembangan pendekatan-pendekatan, proses, dan produk yang selalu menjawab tantangan. Pendidikan karakter diharapkan menanamkan nilai-nilai integritas, etika kerja, dan tanggung jawab sejak dini melalui program pendidikan. Pengembangan kepemimpinan ditujukan untuk menciptakan pemimpin yang inovatif dan visioner di berbagai sektor.

Ketiga, Inovasi dan Kewirausahaan. Pengembangan kemampuan wirausaha atau kewirausahaan dalam satu ekosistem yang inovatif memastikan wirausaha-wirausaha muda atau startup dapat secara kreatif dan inovatif mengembangkan produk dan jasa yang memberikan solusi bagi pengguna atau masyarakat. Oleh karenanya, perlu didukung oleh bimbingan melalui inkubator bisnis, serta bantuan pemerintah untuk memudahkan akses terhadap permodalan seperti *venture capital*, *angel investor*, dan kewirausahaan yang inovatif. Dukungan juga diberikan melalui teknologi produksi atau proses yang berstandar global dan dikemas dalam aplikasi digital. Transformasi digital menjadi suatu keniscayaan sehingga dapat mengintegrasikan seluruh kebutuhan,

baik itu pengembangan SDM dalam pembelajaran digital dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Dengan demikian, literasi digital perlu dirancang dari pendidikan level terendah hingga level tertinggi.

Keempat, Kolaborasi Internasional. Strategi pengembangan modal insan melalui kolaborasi internasional dilakukan dengan kerjasama pendidikan antar negara atau lintas negara. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak ada kesenjangan antara kualitas proses dan output dari pengembangan modal insan melalui pendidikan, serta memastikan terjadinya transfer sains dan teknologi. Dengan demikian, bangsa Indonesia dapat menguasai teknologi terbaik, terlengkap, dan berguna yang ada di muka bumi ini.

Kelima, Kesehatan dan Kesejahteraan. Perlu ditekankan adanya jaminan kesehatan holistik yang baik, baik secara medis maupun tradisional atau herbal. Jaminan kesehatan ini perlu dikembangkan untuk menghadirkan layanan kesehatan berkualitas terbaik sehingga dapat menjamin kesehatan fisik dan mental sumber daya manusia di Indonesia. Selain itu, lingkungan kerja juga harus benar-benar sehat secara psikologis untuk menjamin produktivitas dan kesejahteraan.

Akhirnya, strategi pengembangan sumber daya insani untuk Indonesia Emas perlu berbasis pada kepemimpinan yang kompeten dengan kemampuan digital yang inovatif. Dengan demikian, apa pun perkembangan teknologi di belahan bumi lainnya, manusia Indonesia Emas dapat mengimbangi dan menetapkan dirinya secara kualitas.

Lecturer (Leader) as a Coach: Upaya Memberdayakan Gen Z

Oleh **Dr. Pramudianto, M.Min., M.M., PCC**

Dosen FBE Universitas Atma Jaya Yogyakarta &
Chief Visionary Officer Human Idea PT. Sirao Credentia Menapak

Leader Tidak Semuanya Tahu!

Di dalam menghadapi perubahan yang cepat dan disruptif, perusahaan menyadari bahwa manajer tidak dapat diharapkan untuk memiliki semua jawaban. Kepemimpinan yang memerintah dan mengendalikan tidak lagi dapat bertahan. Akibatnya, banyak perusahaan beralih ke model *coaching* di mana para manajer memfasilitasi pemecahan masalah dan mendorong pengembangan karyawan dengan mengajukan pertanyaan dan menawarkan dukungan, bimbingan daripada memberikan perintah dan membuat penilaian.

Perubahan yang cepat, konstan, dan mengganggu kini menjadi norma, dan apa yang berhasil di masa lalu tidak lagi menjadi panduan untuk apa yang akan berhasil di masa depan. Manajer abad ke-21, tidak (dan tidak bisa!) memiliki semua jawaban yang tepat. Untuk menghadapi kenyataan baru ini, perusahaan-perusahaan beralih dari praktik-praktik komando dan kontrol tradisional dan menuju sesuatu yang sangat berbeda: sebuah model di mana para manajer memberikan dukungan dan bimbingan, bukan instruksi, dan para karyawan belajar bagaimana beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah dengan cara-cara yang dapat memunculkan energi baru, inovasi, dan komitmen.

Berdasarkan pengamatan para ahli selama satu dekade terakhir, banyak organisasi mentransformasi diri dengan program digitalisasi, hal ini adalah perubahan yang dramatis dan mendasar, namun banyak yang gagal. Akhirnya mereka memiliki kesadaran bahwa sebelum transformasi digital, terlebih dahulu transformasi sumber daya manusia. Para mahasiswa pasca sarjana dan pemimpin perusahaan saat ini mulai memiliki kesadaran dalam pelatihan kepemimpinan diperlukan keterampilan *coaching*, untuk melatih para pemimpin sebagai *coach*. Semakin lama, *coaching* menjadi bagian integral dari struktur budaya pembelajaran, sebuah keterampilan yang perlu dikembangkan, diterapkan oleh manajer dan dunia pendidikan yang baik di semua tingkatan.

Coaching sebagai Solusi Kinerja

Bagi para pemimpin yang terbiasa mengatasi masalah kinerja dengan memberi tahu orang-orang apa yang harus dilakukan, pendekatan *coaching* sering kali terasa terlalu "lunak". Terlebih lagi, hal ini dapat membuat mereka tidak nyaman secara psikologis, karena hal ini membuat mereka kehilangan alat manajemen yang paling mereka kenal (sukai): menegaskan otoritas mereka. Jadi mereka menolak *coaching* dan jika dibiarkan sendiri, mereka mungkin tidak akan mencobanya. "Saya terlalu sibuk," kata mereka, atau "Ini bukan penggunaan terbaik dari waktu saya," atau "Orang-orang yang saya tangani tidak bisa di *coach*." Dalam studi klasik Daniel Goleman tentang gaya kepemimpinan, bahwa para pemimpin menempatkan *coaching* sebagai gaya yang paling tidak disukai, dengan mengatakan bahwa mereka tidak memiliki waktu untuk pekerjaan yang membosankan dalam memberdayakan orang lain dan membantu mereka tumbuh. Meskipun banyak manajer yang tidak antusias dengan *coaching*, sebagian besar berpikir bahwa mereka cukup baik dalam hal ini. Namun banyak dari mereka yang tidak. Dalam sebuah penelitian, 3.761 eksekutif menilai kemampuan *coaching* mereka sendiri, dan kemudian penilaian mereka dibandingkan dengan penilaian orang-orang yang bekerja dengan mereka. Hasilnya tidak selaras. Dua puluh empat persen (24%) dari para eksekutif secara signifikan melebih-lebihkan kemampuannya, menilai diri sendiri di atas rata-rata, sementara rekan-rekan kerja menempatkan mereka di sepertiga terbawah dalam kelompok tersebut. Ini adalah ketidaksesuaian yang nyata. "Jika seorang pemimpin merasa dirinya adalah *coach* yang baik, namun kenyataannya tidak," tulis para penulis penelitian. "Data ini menunjukkan bahwa banyak para pemimpin mungkin jauh lebih buruk dari yang mereka bayangkan."

Coaching di Dunia Pendidikan

Jika *coaching* dikaitkan dengan pembinaan generasi Z, maka di lingkup perusahaan, dunia pendidikan hingga di rumah tangga. Baik manajer, guru, dosen maupun orang tua sangat bingung menyikapi mereka, karena perilakunya cenderung tidak mudah diantisipasi.

Kesenjangan terjadi semakin melebar karena kesulitan membangun jembatan antar generasi, dan bagaimana agar terjadi kolaborasi dalam melakukan proses bekerja, mengajar dan pola asuh. Tidak mengherankan ditemukan juga perilaku dosen yang meresahkan mahasiswa, sehingga terdapat perguruan tinggi mulai melarang dosen “killer” untuk mengajar, calon dosen yang “merokok” mulai tidak mendapatkan tempat di berbagai perguruan tinggi, dosen yang tidak mampu berkomunikasi baik dengan mahasiswa menjadi problem di perguruan tinggi. Perubahan kepemimpinan menjadi kepemimpinan yang melayani akan menciptakan budaya baru yang bertitik tolak pada kebutuhan *end user* yaitu mahasiswa (outcome). Berdasarkan penelitian yang saya lakukan, gaya kepemimpinan bisa menjadi sangat efektif apabila para sebagai *coach*. Untuk menghadapi mahasiswa saat ini yang dibutuhkan tantangan, kolaborasi dan inovasi, maka gaya kepemimpinan melayani yang menggunakan teknik *coaching*, mampu menjembati kebutuhan tersebut. Dunia perguruan tinggi sudah saatnya menggunakan program *coaching* (lecturer as a coach) agar para dosen dalam mendampingi para mahasiswa dalam hal akademik, membimbing perilaku mahasiswa, membimbing skripsi, tesis dan disertasi. Dengan demikian mahasiswa mampu memberdayakan, mengoptimalkan dan menemukan hal-hal yang baru dan dapat diimplementasikan (mengacu pada Bloom Taxonomy Level 4-6)

Coaching Meningkatkan Produktivitas

Berdasarkan penelitian Olivero, Nieminen, Sherman dan Freas (et.all) bahwa coaching meningkatkan kinerja dan produktivitas yang drastis. Laporan ICF dan Pricewaterhouse Coopers, bahwa manfaat coaching membawa banyak dampak yaitu pada tantangan pribadi, meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan, efektivitas interpersonal yang lebih besar, dan meningkatkan kepercayaan diri. Mereka yang melakukan coaching mendapatkan peningkatan, berarti dalam produktivitas, kepuasan pada kehidupan dan pekerjaan, serta pencapaian tujuan yang relevan. Hasil penelitian tersebut yaitu:

1. Increased Productivity Profesional

Coaching memaksimalkan potensi dan membuka sumber terpendam untuk peningkatan produktivitas. a). Improved work performance – 70% b). Improved business management – 61% c). Improved time management – 57% d). Improved team

effectiveness – 51%

2. Positive People

Coaching membangun kepercayaan diri karyawan dan berpikir serta bertindak positif untuk menghadapi tantangan yang sangat penting dalam memenuhi tuntutan organisasi a). Improved self confidence – 80% b). Improved relationship – 73% c). Improved communication skill – 72% d). Improved life/work balance – 67%.

3. Return on Investment

Coaching menghasilkan pembelajaran dan kejelasan tindakan ke depan dengan komitmen yang dapat diukur hasilnya. Sebagian besar perusahaan (86%) mengatakan mereka setidaknya mendapatkan kembali investasi (ROI) mereka.

4. Satisfied Client

Hampir semua perusahaan dan individu yang menggunakan coach puas. a). Somewhat or very satisfied with overall experience – 99% b). Would repeat the process – 96%

Laporan ICF pada tahun 2020 diperkirakan total pendapatan global dari coaching pada tahun 2019 adalah \$2,849 miliar dolar AS, meningkat 21% dibandingkan pada tahun 2015. Dan secara global, diperkirakan terdapat sekitar 71.000 praktisi pelatih pada tahun 2019, meningkat sebesar 33% dari perkiraan tahun 2015.

Sedangkan laporan ICF pada tahun 2022 bahwa pendapatan tahunan rata-rata dari coaching diperkirakan meningkat sebesar 12% antara tahun ini 2019 dan 2022 menjadi \$52.800 dolar AS. Pada tahun 2022, coach aktif menghasilkan pendapatan tahunan dari coaching \$4,564 miliar dolar AS (USD), mewakili peningkatan 60% dibandingkan perkiraan tahun 2019.

Coaching Bermanfaat Bagi Peningkatan Kinerja Gen Z

Menurut Pramudianto bahwa the IDEA model coaching (Involve, Desire, Explore dan Action) mampu menjadi alat transformational organisasi. Coaching adalah keterampilan untuk menyambungkan satu titik (atau yang disebut titik kesadaran saat ini) ke titik ujung yaitu tujuan atau goal yang akan dicapai. Jika dua titik itu dihubungkan maka akan menjadi sebuah garis. Melalui pertanyaan coach yang berdaya (powerful questioning),

maka coachee mampu menyambungkan titik satu ke titik lain, artinya coachee telah sampai tujuan. Di dalam garis itu terjadi banyak proses, antara lain monitoring, evaluasi, feedback dan improvement.

Definisi yang digunakan oleh “International Coaching Federation (ICF)”, suatu Organisasi Coaching Global yaitu: “Coaching is partnering with clients in a thought-provoking and creative process that inspires them to maximize their personal and professional potential”. “Coaching sebagai bentuk kemitraan bersama klien (coachee) untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif.”

Faktor-faktor yang membuat coaching sangat diperlukan di dalam organisasi untuk meningkatkan kinerja. 1. Perubahan yang cepat pada lingkungan bisnis eksternal secara lokal dan global yang memiliki dampak secara langsung dengan kinerja. 2. Perubahan organisasi, downsizing, restructuring, mergers dan

bertumbuhnya organisasi baru dari luar (pasar bebas), yang membuat pendekatan manajemen tradisional harus diubah menjadi pendekatan manajemen modern. 3. Pertumbuhan pool of talent yang lambat dan kesulitan dalam menarik dan mempertahankan top talent, sehingga perusahaan harus berkomitmen dalam pengembangan individu. Kompetisi top talent dari berbagai perusahaan lain yang tanpa batas. 4. Terdapat celah yang luas antara apa yang telah dilatih sebelumnya pada supervisor up, dengan kenyataan dinamika pertumbuhan bisnis yang tinggi, yang menuntut para pimpinan meningkatkan performa kerja untuk dapat berkompetisi. 5. Terdapat kegelisahan dari sebagian besar pekerja dan pemimpin organisasi yang bergelut dengan kekhawatiran tentang Job Insecurity, dan tekanan yang meningkat untuk terus menerus menumbuhkan performa kerja. 6. Adanya gap generation, sehingga diperlukan kemampuan pemimpin untuk berkolaborasi dengan generasi yang berbeda, sehingga mereka merasa dikembangkan dan diperhatikan. Hal ini akan meminimalkan adanya turn over pekerja.

Penggunaan QRIS di Kalangan UMKM: Suatu Upaya Pelatihan dan Pendampingan

Oleh **Ronny Prabowo, S.E., M.Com., Ph.D.**
Ketua Bidang ISEI Cabang Salatiga & Dosen FEB UKSW

Fintech merupakan salah satu inovasi dalam industri keuangan yang berkembang pesat. Berdasarkan data *fintech.id*, pada Januari 2022, ada 335 perusahaan, 8 anggota keuangan, dan 7 mitra teknologi telah terdaftar sebagai anggota Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH). Diperkirakan perusahaan yang mengadopsi *fintech* akan terus bertambah setiap tahunnya. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, *fintech* menawarkan berbagai solusi yang akhirnya mulai menjadi trend global.

Salah satu *trend* pembayaran di bidang *fintech* adalah pembayaran secara non tunai atau *cashless* melalui *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS). Penggunaan QRIS sebagai inovasi baru dalam *digital payment* menjadi semakin relevan pada masa pandemi COVID-19. Bank Indonesia mendorong masyarakat menggunakan transaksi secara non tunai dengan menggunakan QRIS sebagai *digital payment*. Bank Indonesia mengharapkan perkembangan QRIS pada pedagang yang usahanya masih bertaraf UMKM karena banyaknya QR Code yang disediakan oleh pedagang dari berbagai Penyedia Jasa Sistem Pembayaran.

Meski QRIS menawarkan banyak manfaat bagi UMKM, akan tetapi tingkat penggunaan QRIS pada UMKM masih rendah. Data Bank Indonesia pada Juni 2023 menunjukkan baru sekitar 27 juta UMKM yang sudah menggunakan QRIS dan masih ada 38 juta lainnya yang belum menggunakan teknologi ini. Rendahnya tingkat penggunaan QRIS ini perlu menjadi perhatian para pemangku kepentingan UMKM mengingat banyaknya manfaat teknologi ini untuk UMKM, seperti mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan kepraktisan transaksi yang berpotensi meningkatkan frekuensi dan nilai transaksi yang pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas UMKM.

Masih rendahnya tingkat adopsi QRIS UMKM mendorong beberapa pengurus ISEI Cabang Salatiga untuk mengadakan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku dan konsumen UMKM di Kota Salatiga terkait dengan penggunaan QRIS. Meskipun

merupakan kota kecil di Provinsi Jawa Tengah, Kota Salatiga terletak sangat strategis karena berada di jalur tol Trans Jawa dan berada di tengah dua kota utama provinsi ini (Semarang dan Surakarta). Pelatihan dan pendampingan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya yang lebih berfokus pada *digital marketing* pada UMKM di Kota Salatiga.

Upaya ini penting dilakukan karena tingkat literasi dan inklusi keuangan UMKM di Provinsi Jawa Tengah masih cukup rendah meskipun lebih tinggi daripada tingkat nasional. Dalam hal ini, tingkat literasi keuangan UMKM termasuk yang paling rendah (OJK, 2020). Selain itu terdapat hampir 15 ribu UMKM di Kota Salatiga yang hanya berpenduduk sekitar 195 ribu jiwa. Hal ini mengindikasikan bahwa UMKM memegang peranan penting bagi perekonomian Kota Salatiga dan peningkatan literasi keuangan UMKM berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota ini.

Identifikasi Penggunaan Digital Payment dan QRIS

Tahap awal pelatihan dan pendampingan ini adalah identifikasi tingkat penggunaan QRIS oleh pelaku dan konsumen UMKM di Kota Salatiga. Survei awal pada UMKM di Kota Salatiga menunjukkan kurang dari setengah UMKM yang menggunakan *digital payment* untuk transaksi usaha mereka. Rendahnya tingkat adopsi QRIS tersebut ternyata terutama disebabkan oleh kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap *digital payment*. Kabar baiknya, dari UMKM yang mengadopsi *digital payment* tersebut, cukup banyak yang menggunakan QRIS. Pelaku UMKM juga mengapresiasi manfaat QRIS bagi usaha mereka, seperti beragamnya fitur dan tingkat kepraktisan.

Sebaliknya, survei awal kepada konsumen UMKM menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka (sekitar 72%) yang sudah menggunakan *digital payment* dalam melakukan transaksi pembayaran dengan UMKM. Kepraktisan dan fleksibilitas yang ditawarkan *digital payment* merupakan alasan utama konsumen UMKM untuk menggunakan *digital payment*. Mirip dengan pelaku UMKM, QRIS merupakan teknologi *digital payment* favorit konsumen UMKM.

Pelatihan dan Pendampingan Penggunaan QRIS

Setelah identifikasi tingkat penggunaan *digital payment* dilakukan, kegiatan selanjutnya adalah pelatihan yang diselenggarakan tanggal 15 Maret 2023 di Pendopo Pakuwon Kantor Pemerintah Kota Salatiga. Narasumber kegiatan ini adalah: Angelita Titis Pertiwi, S.Si., MAccEp staff pengajar Prodi Ilmu Ekonomi FEB UKSW yang memiliki kepakaran pada ekonomi digital; Dartho Supriyadi, S.E., M.Si., selaku Direktur Utama Bank Salatiga; dan Natalia Raras Anggani, S.Pd. selaku anggota tim pemasar Bank Jateng. Total peserta adalah 80 orang yang terdiri dari 30 pelaku UMKM, 25 anggota Paguyuban Pedagang Pasar Pagi Kota Salatiga, dan 25 Ibu-ibu PKK Muda Produktif.

Setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan selesai, tim masih melakukan pendampingan terhadap UMKM yang mengikuti pelatihan selama tiga bulan untuk membantu pelaku UMKM dalam proses adopsi QRIS dan memantau perkembangan tingkat adopsi QRIS oleh pelaku UMKM tersebut. Hasilnya cukup menggembirakan. Sebelum pelatihan tidak ada peserta yang menggunakan QRIS untuk transaksi

usaha mereka. Setelah tiga bulan pendampingan, tujuh pelaku UMKM mengadopsi QRIS. Meski demikian, angka tersebut belum terlalu menggembirakan. Alasan utama pelaku UMKM memutuskan untuk belum mengadopsi QRIS adalah kepraktisan. Banyak UMKM yang membeli/ menjual barang atau jasa dari atau kepada pihak lain yang masih sangat rendah tingkat literasi keuangannya (seperti orang tua atau pelajar). Selain itu latar belakang demografis pelaku UMKM (usia dan pendidikan) mempengaruhi keputusan UMKM untuk belum menerapkan QRIS dalam usaha mereka.

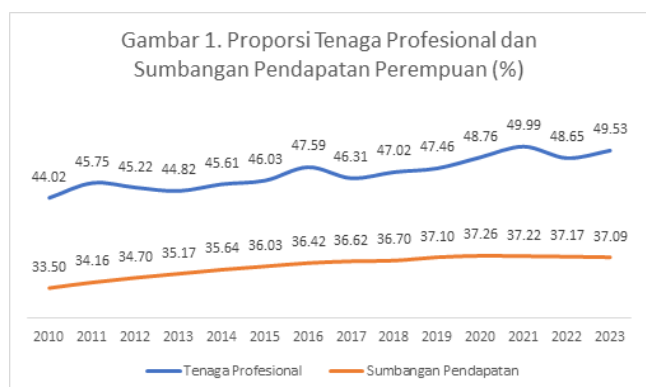
Secara keseluruhan, upaya pelatihan dan pendampingan ini sangat bermanfaat bagi peningkatan tingkat penggunaan QRIS pada pelaku UMKM. Meski demikian, perlu upaya sosialisasi dan pelatihan yang lebih intensif dan ekstensif untuk segenap elemen masyarakat tentang manfaat QRIS. Upaya sosialisasi QRIS yang hanya berfokus pada pelaku UMKM berpotensi kurang optimal karena ketergantungan mereka terhadap perilaku konsumen ataupun pemasok mereka.

Tenaga Profesional Perempuan Semakin Banyak, Mengapa Kontribusi Pendapatannya Masih Rendah?

Oleh **Ema Tusianti, S.ST., S.AB., M.T., M.Sc.**

Fungsional Statistisi Ahli Muda, Direktorat Analisis & Pengembangan Statistik BPS

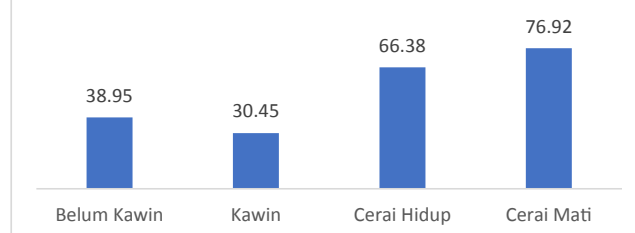
Data BPS menunjukkan bahwa separuh dari pekerja profesional saat ini adalah perempuan. Dengan kata lain, proporsi pekerja profesional laki-laki dan perempuan adalah 50:50. Namun, jika dilihat dari agregat pendapatannya, kontribusi atau sumbangan pendapatan perempuan hanya mencapai 37 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan masih mengalami ketimpangan dalam perolehan upah dan pendapatan meskipun posisi atau kualitas pekerjaan mereka sudah cukup baik. Hal apa sajakah yang menyebabkan fenomena ini dan bagaimana mengatasinya?



Sumber: BPS (2024a) dan BPS (2024b)

Faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan upah/pendapatan antara laki-laki dan perempuan antara lain: Pertama, Stereotip Gender dan Diskriminasi. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kesenjangan upah/pendapatan antara laki-laki dan perempuan adalah stereotip gender dan diskriminasi yang masih melekat di tempat kerja (Williams et al., 2010). Stereotip ini seringkali mempengaruhi pandangan atasan tentang kemampuan pegawai perempuan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi penilaian kinerja dan keputusan kenaikan gaji. Perempuan seringkali dianggap kurang kompeten atau kurang ambisius dibandingkan laki-laki, meskipun memiliki kualifikasi yang sama. Akibatnya, perempuan lebih jarang dipromosikan ke posisi manajerial atau eksekutif yang biasanya menawarkan gaji lebih tinggi. Di Indonesia, perbandingan laki-laki dan perempuan yang berstatus sebagai manajer berada pada angka 65:35 (BPS, 2024c). Stereotipe lainnya yang masih

Gambar 2. Proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial, menurut status perkawinan, 2023



Sumber: BPS (2024d)

melekat adalah anggapan bahwa laki-laki yang diasumsikan sebagai kepala rumah tangga harus memiliki pendapatan yang lebih tinggi (Bertrand et al., 2015). Hal tersebut juga menjadi penghalang perempuan memperoleh upah/gaji lebih tinggi ditempat kerja. Kondisi ini terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Kedua, Peran Ganda dan Tanggung Jawab Lingkup Domestik. Peran ganda yang dijalankan oleh perempuan, yaitu sebagai pekerja dan pengurus rumah tangga, juga berkontribusi pada kesenjangan upah. Perempuan masih diharapkan untuk mengelola rumah tangga dan mengasuh anak, meskipun mereka bekerja penuh waktu. Pemikiran ini masih menjadi budaya di beberapa negara termasuk Indonesia. Beban ganda mengurangi waktu dan energi yang teralokasikan perempuan untuk mengejar karier mereka. Selain itu, cuti melahirkan dan tanggung jawab pengasuhan anak dapat membuat perempuan keluar dari angkatan kerja untuk jangka waktu tertentu, yang pada akhirnya menghambat kemajuan kariernya. Kurangnya alokasi waktu dan energi serta ketidakhadiran perempuan dalam pekerjaannya dapat mempengaruhi pengalaman kerja dan peluang promosi. Hal ini tentunya berujung perbedaan upah dengan laki-laki yang tidak mengalami hambatan serupa. Hal ini pula lah yang menjadi *glass ceiling* (plafon kaca) yang menghambat perempuan mengejar puncak kariernya, utamanya mereka yang memiliki beban ganda. Data BPS menunjukkan bahwa, proporsi

manager perempuan yang berstatus menikah/kawin paling rendah dibandingkan dengan status perkawinan lainnya. Dari 100 pekerja yang menikah dan menduduki posisi manajerial, 30 diantaranya perempuan. Angka terbanyak diduduki oleh mereka yang berstatus cerai mati. Dari 100 pekerja yang cerai mati dan menduduki posisi manajerial, 77 diantaranya perempuan.

Ketiga, kurangnya Akses ke Pendidikan dan Pelatihan. Dalam satu dekade terakhir, tingkat partisipasi sekolah kaum perempuan yang mengenyam pendidikan tinggi meningkat, bahkan melebihi laki-laki. Data terbaru menunjukkan perbandingan 29 persen dibanding 25 persen (BPS, 2024e). Artinya lebih banyak perempuan yang mengenyam pendidikan tinggi/universitas dibandingkan laki-laki. Akan tetapi jika diteliti lebih detail, masih ada kesenjangan akses terhadap bidang studi tertentu yang dapat menghasilkan upah yang lebih tinggi. Bidang studi teknologi informasi, teknik, dan ilmu pengetahuan masih didominasi oleh laki-laki. Hal ini tergambar dari berbagai penelitian-penelitian yang pernah dilakukan, seperti oleh Warsito, et al., (2023); Tamba & Chiang (2021). Di antara negara ASEAN, posisi Indonesia kalah dari Brunei Darussalam dan Myanmar (Unesco, 2024). Proporsi perempuan dalam bidang Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) di Indonesia mencapai 37 persen. Ketimpangan akses pendidikan pada bidang STEM dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan upah/pendapatan diantara laki-laki dan perempuan. Selain kurangnya akses ke bidang pekerjaan yang memiliki produktivitas tinggi seperti STEM, rendahnya akses terhadap pelatihan dan pengembangan profesional juga menjadi penghalang bagi perempuan untuk meningkatkan upah/pendapatannya. Akses ini bisa disebabkan oleh kurangnya waktu yang tersedia akibat beban ganda yang ditopang perempuan atau juga karena kurangnya jejaring sosial yang mendukung.

Keempat, ketidaksetaraan dalam Negosiasi Gaji. Perempuan juga sering menghadapi ketidaksetaraan dalam proses negosiasi gaji. Studi menunjukkan bahwa perempuan cenderung kurang agresif dalam menegosiasikan gaji. Laki-laki cenderung bernegosiasi untuk mendapatkan gaji lebih tinggi (Leibbrandt & List, 2015). Selanjutnya, laki-laki juga cenderung berhasil dalam melakukan negosiasi tersebut (Stuhlmacher & Walters, 1999). Hal ini mungkin disebabkan oleh norma sosial yang menekankan bahwa perempuan

harus lebih bersikap rendah hati dan tidak terlalu menonjolkan diri. Selain itu, ketika perempuan mencoba untuk menegosiasikan gaji yang lebih tinggi, mereka seringkali dianggap negatif dan dapat menghadapi penolakan. Ketakutan akan reaksi negatif ini dapat membuat perempuan enggan untuk menegosiasikan gaji mereka, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesenjangan upah.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan tindakan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, dan individu. Pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan yang mendorong ke setaraan gender, seperti undang-undang yang melarang diskriminasi gaji dan memastikan transparansi gaji di semua sektor. Selain itu, kebijakan yang mendukung pembagian tanggung jawab rumah tangga, seperti cuti ayah merupakan hal yang penting untuk memberikan ruang bagi perempuan untuk lebih produktif.

Perusahaan juga harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan adil. Ini termasuk memastikan bahwa proses rekrutmen dan promosi bebas dari bias gender, menawarkan pelatihan dan pengembangan profesional yang sesuai untuk perempuan, serta mempromosikan budaya kerja yang mendukung keseimbangan kerja-kehidupan.

Selanjutnya, untuk mencapai kesetaraan gender, baik perempuan maupun laki-laki harus berpartisipasi dalam mengubah norma dan stereotip gender yang ada. Perempuan harus diberikan kepercayaan diri untuk menegosiasikan gaji mereka. Perempuan juga harus diberikan akses untuk mencari peluang dalam pengembangan karier. Sementara itu, laki-laki harus menjadi partner dalam perjuangan kesetaraan gender, termasuk dari hal yang kecil seperti dalam lingkup rumah tangga. Berbagi peran dalam urusan rumah tangga dan pengasuhan anak, merupakan hal yang baik untuk mendukung perempuan menembus rintangan *glass ceiling* dalam menuju karier terbaiknya.



LAMEMBA

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI MANAJEMEN BISNIS DAN AKUNTANSI

**Berkomitmen untuk Meningkatkan Kualitas
Pendidikan Tinggi di Indonesia**

Member of

In cooperation with

INQAAHE
Full Member

apqn
ASIA-PACIFIC QUALITY NETWORK

AACSB
Business Education.
Connected.



lamemba.or.id



lamemba.id



lamemba



lamemba

SINOPSIS BUKU ORCHESTRA

Bagaimana pengelolaan sumber daya manusia menginspirasi dalam menyatukan irama bisnis

Penulis: Prof. Christantius Dwiatmadja, M.E., Ph.D. dkk



Orkes berasal dari kata bahasa Belanda *orkest* yang berarti sama. Kata *orkest* bermuara dari kata dalam bahasa Yunani kuno, *ορχήστρα* *orkhēstra*, yang berarti area antara tempat duduk penonton dan panggung, yang digunakan oleh penyanyi koor dan pemain musik. Kata tersebut dalam bahasa Yunani modern diterjemahkan sebagai tempat menari. Di beberapa teater, istilah *orchestra* merujuk ke tempat-tempat duduk di depan panggung, atau yang sering disebut dengan *prima fila* atau *platea*. Namun, istilah ini lebih tepat disebut panggung atau aula konser.

Orkes mulai muncul pada abad ke-15 dan ke-16. Pada zaman itu, orkes terbentuk karena adanya suatu kebutuhan dari para bangsawan. Musisi pada abad ke-17 antara lain Henry Purcell dari Inggris, dan Jean-Baptiste Lully dari Prancis. Pada abad ke-17 dan ke-18, orkes-orkes kecil terdiri dari musisi-musisi yang tersedia. Orkes tersebut dipimpin oleh seorang komposer. Para komposer itu memiliki gaya yang berbeda-beda dalam merekrut anggota-anggotanya. George Frideric Handel, komposer asal Jerman, hanya memilih musisi-musisi terbaik yang ada. Sedangkan Johann Sebastian Bach, yang juga berasal dari Jerman, merekrut hampir semua musisi yang ada di kotanya.

Profesor Christantius bagaikan seorang komposer yang memilih musisi-musisi terbaik, yaitu ahli-ahli, orang-orang terbaik dalam bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Indonesia. Orkestra Manajemen Sumber Daya Manusia terbentuk karena adanya kebutuhan yang berubah di dunia industri dalam mengelola sumber daya manusia milenial. Orkestra ini ingin menampilkan karya-karya terbaiknya sehingga menjadi sumber inspirasi, karena bukan hanya sekedar pengetahuan tentang strategi, namun mencakup sebuah eksekusi dalam mengelola sumber daya manusia.

Pengelolaan sumber daya manusia terus berubah seiring dengan perubahan zaman yang saat ini fokus pada disrupsi, industri 4.0, society 5.0, gap generasi dan covid 19, sehingga para akademisi dan praktisi tidak boleh lengah mengikuti perubahan tersebut. Seiring waktu, perusahaan semakin memahami pentingnya pengelolaan sumber daya manusia karena perkembangan kerumitan bisnis di dunia beberapa tahun terakhir telah meluncurkan berbagai pemikiran baru tentang solusi untuk masalah manusia. Dominasi bagian SDM sebagai satu-satunya bagian yang mengelola manusia telah mendapatkan tantangan. Di berbagai perusahaan yang sangat maju, sebuah trend yang unik sedang terjadi: Belasan praktisi SDM yang cukup memahami bisnis organisasinya diangkat menjadi pemimpin tertinggi atau wakil pemimpin tertinggi posisi yang tadinya terbatas untuk bagian lain kini mulai diduduki oleh pakar manusia. Jelaslah bahwa perusahaan-perusahaan ini menyadari betapa pentingnya peran manusia di masa depan. Perubahan yang mendasar pada pengelolaan sumber daya manusia, mengubah nama pimpinan yang membidangi yaitu dari Chief Human Resources Officer (CHRO) menjadi Chief People Officer (CPO) atau Chief Human Idea Officer (CHIO).

Trend ke depan pengelolaan sumber daya manusia menjadi sangat vital dikarenakan memiliki kaitan yang terhadap budaya perusahaan, teknologi dan inovasi. Berdasarkan McKinsey Research bahwa perkembangan yang sangat pesat, dengan adanya Industri 4.0 atau industri cerdas membuat banyak hal

menjadi otomatisasi, yaitu bidang *Healthcare*, *Construction*, *Manufacturing* dan *Retail*, sehingga akan terjadi *Jobs Lost*, *Jobs Gained* dan *Jobs Changed*. Menurut riset PricewaterhouseCoopers (PwC) dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu berkolaborasi, berinovasi dan memiliki kemampuan teknologi, oleh karena itu diperlukan percepatan perubahan pengelolaan sumber daya manusia yang sesuai dengan konteksnya yaitu budaya, teknologi dan inovasi, Jacob Morgan menyebutnya budaya, teknologi dan fisik.

PricewaterhouseCoopers (PwC) *research* menyampaikan dalam melakukan antisipasi sampai pada tahun 2030 perusahaan perlu, pertama menemukan, mencari, dan menarik talenta terbaik. Melalui pasar *online* perusahaan saling berebut tenaga kerja yang memiliki talenta, karena talenta memiliki keterkaitan dengan imbalan dan kesempatan perusahaan mendapatkan peluang untuk sukses. Oleh karena itu organisasi bersaing untuk menemukan dan mengamankan talenta terbaik yang tersedia di perusahaan dan menggunakan berbagai metode pencarian dan melakukan evaluasi agar karyawan yang memiliki talenta cemerlang tetap bertahan untuk keberlangsungan hidup perusahaan.

Kedua, penghargaan dan kinerja. Mereka yang memiliki keterampilan yang sesuai kebutuhan organisasi selalu mengharapkan penghargaan yang tinggi. Kinerja selalu dimonitor dan diukur secara obsesif dan sering secara *real-time*. Mereka yang memiliki kinerja yang baik selalu diberikan insentif atau bonus yang terbaik.

Ketiga, pembelajaran dan pengembangan. Setiap karyawan memiliki tanggung jawab secara pribadi dalam pembelajaran dan pengembangan diri, agar kemampuannya meningkat. Pengembangan perlu terkonsentrasi pada kelompok inti yang memiliki potensi besar dan meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam konteks ini baik peran *executive coaching* dan *self coaching* menjadi kebutuhan mendasar bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Keempat, peran sumber daya manusia semakin berkurang karena digantikan oleh otomatisasi, tim outsourcing dan pengorganisasian diri. Dalam memprediksi talenta sumber daya manusia diperlukan analisa yang tepat sehingga mampu mengantisipasi

adalah karyawan yang memiliki multi talenta, dan ini menjadi tantangan bagi perguruan tinggi untuk melakukan *link and match* dan bagian *learning and development* membekali para karyawannya dalam hal *hard skill* dan *soft skill*. Kelima, teknologi memberdayakan sumber daya manusia untuk berkinerja lebih optimal, oleh karena itu diperlukan pengukuran agar dalam pengelolaan sumber daya manusia menjadi tepat dan kinerjanya meningkat secara konsisten. Karyawan benar-benar dituntut mampu menggunakan teknologi sebagai sarana mempercepat atau meningkatkan kinerja perusahaan.

Buku Orchestra ini hadir tepat waktu karena membekali para mahasiswa strata satu, mahasiswa magister manajemen dan program doctoral, bahkan para praktisi sumber daya manusia supaya mampu mempersiapkan tantangan ke depan dengan baik. Hasil karya Prof Christantius Dwiatmadja, M.E., Ph.D. (Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga) yang menggugah para ahli pengelolaan sumber daya manusia yang berada di perguruan tinggi untuk berkontribusi secara modern terhadap pengelolaan sumber daya manusia yaitu Prof. Dr. Suharnomo, M.Si. (Universitas Diponegoro), Dr. Majang Palupi, BBA., MBA (Universitas Islam Indonesia); Prof. Dr. Heru Kurnianto Tjahjono, M.M. (Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia dan Universitas Gajah Mada); Prof. Dr. Sundring Pantja Djati, M.Si., M.A. (Universitas Trisakti Jakarta); Prof. Olivia Fachrunnisa, M.Si., Ph.D (Universitas Sultan Agung Semarang); Prof. Dr. Asri Laksmi Riani, M.S. (Universitas Sebelas Maret Surakarta); Prof. Dr. Noermijati, MTM, CPHR (Universitas Brawijaya Malang); Dr. Indi Djastuti, M.S. (Universitas Diponegoro Semarang); Prof. Dr. Anis Eliyana, M.Si. (Universitas Erlangga Surabaya); Prof. Dr. Eddy Madiono Sutanto M.Sc (Universitas Petra Surabaya); Prof. Andreas Budihardjo Surijah, M.Psi., Ph.D (Universitas Prasetya Mulya Jakarta), dan Dr. Pramudianto, M.Min., M.M., PCC (Universitas Atma Jaya Yogyakarta)

Peran Kota Samarinda sebagai Daerah Mitra IKN

Oleh **Dr. Aji Sofyan Effendi**

Ketua ISEI Samarinda & Dosen FEB Universitas Mulawarman, Samarinda

Indonesia tengah melangkah menuju era baru dengan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah yang lebih strategis dan terencana, yaitu Kalimantan Timur. Proyek ambisius ini dikenal sebagai Ibukota Nusantara (IKN). Dengan pemindahan ibu kota ini, diharapkan akan terjadi pemerataan pembangunan dan pengurangan beban Jakarta yang selama ini menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan bisnis. Salah satu kota yang akan memiliki peran signifikan dalam mendukung dan mensukseskan proyek ini adalah Kota Samarinda.

Samarinda, sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Timur, memiliki posisi geografis dan strategis yang menguntungkan. Kota ini terletak relatif dekat dengan lokasi yang direncanakan untuk IKN, sehingga menjadikannya sebagai salah satu daerah mitra utama. Peran Samarinda tidak hanya terbatas pada dukungan logistik dan infrastruktur, tetapi juga dalam penyediaan sumber daya manusia, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai sektor lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan IKN.

Sebagai daerah mitra, Samarinda diharapkan dapat menjadi penyangga utama yang mendukung keberlanjutan pembangunan dan operasional IKN. Pengembangan infrastruktur di Samarinda, seperti jaringan transportasi, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya, akan sangat krusial dalam mendukung mobilitas dan distribusi barang serta jasa antara Samarinda dan IKN. Selain itu, sektor ekonomi di Samarinda juga diharapkan dapat tumbuh dan berkembang seiring dengan adanya sinergi dengan IKN, membuka peluang baru bagi investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dalam konteks yang lebih luas, peran Samarinda sebagai daerah mitra IKN mencerminkan pentingnya kolaborasi dan integrasi antarwilayah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Dengan potensi yang dimiliki, Samarinda diharapkan mampu bertransformasi menjadi kota yang lebih maju dan modern, sekaligus mendukung suksesnya proyek IKN sebagai simbol kemajuan Indonesia di masa depan.

Perekonomian Kota Samarinda

Kota Samarinda, memiliki letak geografis di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Kota ini berada di tepi Sungai Mahakam, salah satu sungai terpanjang di Indonesia yang menjadi simbol kota Samarinda, dengan luas wilayah sekitar 718 Km² dan jumlah penduduk sekitar 900.000 jiwa, menempatkan kota Samarinda ini sebagai kota industri, jasa dan perdagangan, sebagian besar penduduk Kota Samarinda bekerja di 3 sektor tersebut plus sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda juga banyak warganya bekerja sebagai PNS Di Pemerintah Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur, sampai saat ini angka pertumbuhan ekonomi kota Samarinda tahun 2023 adalah sebesar 8,62 % dengan angka pengangguran 5,92 % dan angka kemiskinan sebesar 4,81 %.

Dampak Pemindahan IKN bagi Perekonomian Kota Samarinda

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur diprediksi akan membawa berbagai dampak signifikan terhadap perekonomian Kota Samarinda. Pertama, Pemindahan IKN akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Samarinda melalui peningkatan investasi dan aktivitas ekonomi. Pembangunan infrastruktur yang masif dan kebutuhan akan berbagai layanan dan barang akan menarik investasi dari sektor swasta, baik domestik maupun internasional. Kedua, pembangunan dan operasional IKN akan menciptakan banyak lapangan kerja baru di Samarinda. Sektor konstruksi, transportasi, layanan, dan industri pendukung lainnya akan membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar. Hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Ketiga, untuk mendukung peran Samarinda sebagai daerah mitra IKN, akan ada peningkatan dan pengembangan infrastruktur di kota ini. Pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya akan mempermudah mobilitas dan distribusi barang serta jasa. Infrastruktur yang lebih baik juga akan menarik lebih banyak investasi dan bisnis ke Samarinda. Keempat, permintaan akan berbagai layanan, seperti perhotelan, restoran, kesehatan, dan pendidikan, akan

meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk dan aktivitas ekonomi di Samarinda. Hal ini akan mendorong pertumbuhan sektor jasa dan meningkatkan kualitas layanan yang tersedia. Kelima, Samarinda, yang selama ini banyak bergantung pada sektor pertambangan dan kehutanan, akan memiliki kesempatan untuk mendiversifikasi ekonominya. Sektor-sektor seperti manufaktur, perdagangan, dan teknologi informasi dapat berkembang lebih pesat dengan adanya sinergi dengan IKN. Keenam, dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan investasi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda diperkirakan akan meningkat. Pajak dari bisnis baru, retribusi, dan kontribusi lain dari sektor swasta akan memberikan tambahan pemasukan bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan layanan publik. Terakhir, selain dampak positif, pemindahan IKN juga membawa tantangan dan risiko. Potensi meningkatnya urbanisasi bisa menyebabkan tekanan pada infrastruktur dan layanan publik yang ada. Masalah sosial seperti kemacetan, polusi, dan peningkatan harga properti juga perlu diantisipasi dan dikelola dengan baik.

Strategi Pengembangan Ekonomi Kota Samarinda, Pasca IKN

Pasca IKN maka Kota Samarinda perlu melakukan strategi arah dan orientasi pembangunan ekonomi kota, sebagai kota mitra IKN maka banyak peluang, Opportunity yang diperoleh Kota Samarinda untuk mengisi IKN tersebut, adapun strategi pengembangan ekonomi Kota Samarinda pasca IKN dapat dilakukan dengan cara: Pertama, melalui Promosi Investasi daerah. Pemerintah Kota Samarinda, perlu memastikan bahwa segala regulasi, perizinan, Lahan dan tenaga kerja dalam upaya menarik investor menjadi hal yang penting dan strategis, banyak kasus investor batal melakukan investasi karena tidak jelasnya masalah tersebut diatas, pertemuan-pertemuan pada forum investor tingkat nasional dan global perlu dilakukan, untuk memastikan kepada para investor bahwa dari sisi regulasi, ketenagakerjaan, keamanan, infrastruktur, public utility, dipastikan terjamin.

Kedua, melalui Inovasi Semua Bidang Pembangunan dan Pelayanan Publik. Salah satu unsur terpenting untuk menjadikan Kota Samarinda sebagai mitra IKN adalah, menjadi kota "smart city" maka Inovasi menjadi hal yang penting, IKN bercirikan sebagai sebuah kota yang smart city, untuk itu maka Kota Samarinda juga harus mengikuti sebagai kota yang smart city, IKN

boleh kinclong tapi Kota Samarinda harus moncer.

Ketiga, melalui kemitraan. Kehadiran IKN di Kalimantan Timur, menjadi anugerah bagi warga Kaltim dan Kota Samarinda, bahwa plus-minus pemindahan IKN pasti ada, namun demikian bagi warga Kota Samarinda, harus bisa menyiapkan diri dengan kesempatan dan peluang tersebut. Kemitraan menjadi salah satu strategi Pembangunan ekonomi Kota Samarinda, melakukan kerjasama dengan Badan Otorita IKN atau nantinya menjadi daerah khusus IKN, perlu dilakukan, dalam rangka mengambil peluang ekonomi tersebut. Begitu pula halnya kemitraan dengan daerah lain yang berada di Kawasan Timur Indonesia, perlu menjadi prioritas utama, karena inti dari pemindahan IKN ke Kaltim adalah agar tidak terjadi kesenjangan antara KTI vs KBI.

Desain kerjasama ekonomi Kota Samarinda dengan otorita IKN, dapat dilakukan melalui 3 jalur, yaitu melalui jalur kerjasama Pemerintah (G to G), Kerjasama Perusda (B to B) dan Kerjasama Masyarakat (P to P) masing-masing berperan berdasarkan tupoksinya, misalnya pemerintah menerbitkan regulasi/perkada dalam hal kerjasama ekonomi, yang kemudian ditindak lanjuti dengan unsur entitas bisnis atau perusda, yang bisa bekerjasama dengan Badan Usaha Otorita IKN atau Perusahaan daerah di kawasan timur Indonesia, terakhir adalah unsur masyarakat/society, dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat khususnya di sektor UMKM.

Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur membawa peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda. Dengan perencanaan dan manajemen yang tepat, Samarinda dapat memanfaatkan momentum ini untuk menjadi kota yang lebih maju dan sejahtera. Namun, perhatian terhadap tantangan yang mungkin muncul juga penting untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

Pertumbuhan Ekonomi Melambat, Sulsel Terancam Keluar dari Top Ten Share Ekonomi Nasional

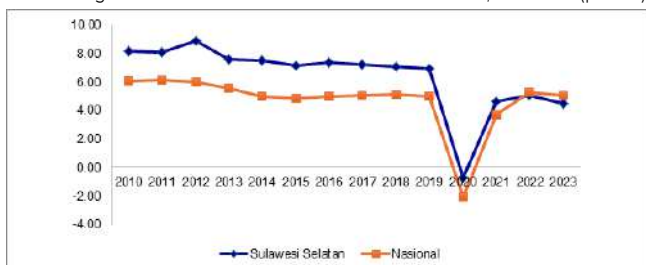
Oleh: **Dr. Sultan Suhab**

Koodinator Wilayah Timur PP-ISEI, Ketua ISEI Cabang Makassar serta
Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan (PPKP) LPPM & Dosen FEB Universitas Hasanuddin

Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) merupakan salah satu pilar perekonomian nasional, setidaknya hingga saat ini. Ditunjukkan dengan kontribusi PDRB Sulsel terhadap PDB Nasional yang besar, salah satu dari *top ten* provinsi *share* terbesar. Selain itu, hingga tahun 2021 capaian pertumbuhan ekonomi Sulsel secara konsisten menunjukkan kinerja lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi pada tahun 2022 daerah ini mencatat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari nasional, inilah 'fase baru' pertumbuhan ekonomi daerah Sulsel yang selalu mencatat capaian pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari capaian nasional. Selama 2022, ekonomi Sulsel hanya bertumbuh 5,10%, lebih rendah dari capaian nasional 5,31% pada tahun yang sama. Perlambatan berlanjut pada 2023 dan nampaknya akan semakin tercipta *gap* yang kian melebar dengan capaian nasional. Perekonomian Sulsel hanya bertumbuh 4,51%, capaian yang bukan hanya mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya, tetapi juga semakin memperlebar *gap* dengan capaian nasional yang bertumbuh 5,05% pada tahun yang sama. Bila perekonomian Sulsel kembali mengalami perlambatan pada tahun 2024 ini, bukan tidak mungkin perekonomian Sulsel akan terlempar dari *top ten* provinsi pilar utama perekonomian nasional. Pemerintah daerah dan pelaku ekonomi perlu mengambil kebijakan strategis untuk mengatasinya.

Gambar-1

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Sulsel dan Nasional, 2010-2023 (persen)



Sumber: BPS (2024)

Kebijakan strategis memitigasi kecenderungan perlambatan pertumbuhan ekonomi Sulsel sangat beralasan. Rilis data BPS, menunjukkan pertumbuhan ekonomi Sulsel triwulan-1 2024 hanya tumbuh 4,82% (y-on-y) dan terkontraksi -4,63% (q-to-q). Meskipun secara historis ekonomi Sulsel selalu terkontraksi di

triwulan-1 (q-to-q), sehingga masih terlalu dini menyimpulkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi tahun 2024 kembali akan melambat, tapi tidak akan cukup mengangkat optimisme para ahli ekonomi untuk mengatakan bahwa ekonomi Sulsel tidak akan mengalami perlambatan yang kian tajam pada tahun 2024 ini. Kekhawatiran ini cukup beralasan, mengingat kontraksi pertumbuhan di triwulan-1 baru terjadi lima tahun terakhir. Sebelumnya, pertumbuhan triwulan-1 selalu positif. Selain karena industri pengolahan dan perdagangan, kontraksi triwulan-1 2024 ini, juga disebabkan sektor konstruksi serta sektor jasa perusahaan. Kondisi ini sudah terpola dalam beberapa tahun terakhir, disebabkan proyek pemerintah yang setiap awal tahun realisasinya sangat rendah.

Share Terhadap Perekonomian Nasional Menurun

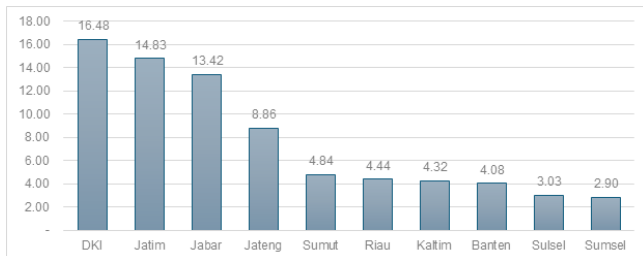
Hingga tahun 2023, *share* ekonomi Sulsel terhadap perekonomian nasional mencapai 3,03%, terbesar kesembilan dari 38 provinsi di Indonesia. Capaian ini menurun dari *share* tahun 2022 yang mencapai 3,05%. Penurunan ini terutama karena peningkatan *share* perekonomian daerah yang berada di luar *top ten* provinsi dengan PDRB terbesar. Akibat dari perlambatan pertumbuhan yang dialami dalam tiga tahun terakhir, dan bila perlambatan tersebut masih berlanjut, perekonomian daerah Sulsel posisinya setiap saat bisa tergeser oleh Sumsel dan daerah lainnya. Pada saat yang sama akan semakin sulit menggeser posisi Provinsi Banten beserta dengan daerah yang memiliki *share* yang lebih besar lainnya.

Bagi pengambil kebijakan pembangunan dan pelaku ekonomi daerah di Sulsel agar tidak berpuas diri dengan posisinya sebagai kekuatan utama perekonomian Regional Pulau Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Saatnya hadir dengan grand design optimisme perekonomian daerah yang mampu memotivasi pelaku ekonomi, menjadi yang terbesar di luar Pulau Jawa, menjadi lima besar kekuatan ekonomi nasional dalam jangka panjang. Sulsel tidak cukup dengan *share* hampir 50% terhadap perekonomian Pulau Sulawesi dan 30% berkontribusi pada total PDRB KTI. Sejatinnya, perekonomian daerah Sulsel

harus bertransformasi menjadi provinsi dengan *share* terbesar di luar Pulau Jawa, melampaui Sumut, Riau, Kaltim dan Banten.

Gambar-2

Share PDRB Provinsi terhadap PDB Nasional, Tahun 2023 (persen)



Sumber: BPS, 2024

Dalam perspektif kewilayahan, perekonomian daerah Sulsel merupakan yang terbesar di KTI, yang meliputi 16 provinsi di Sulampua dan Nusa Tenggara, bahkan di luar Pulau Jawa hanya kalah dengan Sumut, Riau dan Kaltim. Tanpa memperhitungkan produk migas, *share* Sulsel hanya sedikit lebih rendah dibandingkan Sumut dari seluruh provinsi di luar Pulau Jawa. Fakta ini menggambarkan peran strategis perekonomian Sulsel secara kewilayahan dan merupakan salah satu barometer kemajuan perekonomian nasional. Posisi strategis dengan berbagai peluang dan kesempatan dalam kebijakan pembangunan ekonomi nasional, mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, khususnya di KTI memberi peluang mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah di Sulsel. Sejumlah infrastruktur ekonomi strategis telah tersedia di Sulsel. Sebagai hub perekonomian KTI, telah dibangun New Port Makassar (NPM) sebagai pelabuhan hub terbesar di KTI dengan kapasitas 2,5 juta TEUs (*twenty-foot equivalent unit*) peti kemas. Saat yang sama peningkatan kapasitas Sultan Hasanuddin International Airport (SHIA) menjadi 15 juta penumpang per tahun. Dua infrastruktur ini saja, menggambarkan betapa pentingnya daerah ini bagi perekonomian nasional, kini dan yang akan datang. NPM dan SHIA akan menjadi lalu lintas penting perdagangan internasional Indonesia dan domestik. Menempatkan Sulsel sebagai hub paling strategis untuk mobilitas manusia dan lalu lintas sistem logistik nasional. Kegiatan ekonomi KBI dan KTI terintegrasi secara fungsional sehingga tercipta kesejahteraan dan keseimbangan kekuatan ekonomi yang saling mendukung menuju Indonesia Emas 2045.

Mengotimalkan Sumber Pertumbuhan Regional dan Sektoral

Target jangka pendek, pertumbuhan ekonomi Sulsel

harus lebih akseleratif. Mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dari pertumbuhan nasional, sebagaimana dicapai hingga 2021. Secara regional sentra-sentra produksi utama kabupaten/kota di Sulsel harus kembali dibangkitkan, terutama yang mengalami kontraksi cukup dalam 2020 yang lalu. Sumber utama pertumbuhan ekonomi Sulsel diperankan oleh kabupaten dan kota dengan *share* PDRB signifikan serta pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari provinsi. Pada tahun 2023, diperankan oleh lima daerah, yakni Makassar, Gowa, Luwu, Pangkep dan Luwu Timur. Dua daerah disebut terakhir mengandalkan industri ekstraktif, Industri Semen di Pangkep (BUMN - PT. Semen Tonasa) dan Pertambangan Nikel di Luwu Timur (PMA - PT. Vale). Kedua daerah ini kurang tepat untuk diandalkan terciptanya pertumbuhan ekonomi Sulsel secara berkelanjutan dan inklusif dalam jangka Panjang, karena selain mengandalkan sumber alam yang tidak terbarukan juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal pasar global. Sehingga untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, sumber utama pertumbuhan daerah bertumpu pada Makassar, Gowa dan Luwu beserta sejumlah kabupaten/kota lainnya yang bertumbuh pesat dalam tiga tahun terakhir seperti Bantaeng, Luwu Utara, Palopo dan Bulukumba.

Secara sektoral, perekonomian Sulsel mengandalkan empat sektor utama, dengan *share* mencapai 62% hingga triwulan-1 2024. Keempatnya adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (21,20%), Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Motor (14,68%), Industri Pengolahan (13,41%), dan Konstruksi (12,75%). Untuk menjadi sumber pertumbuhan, sektor ekonomi ini tidak cukup dengan *share* yang besar, tetapi juga harus dibarengi dengan pertumbuhan yang tinggi. Seperti ditunjukkan 2023, pertumbuhan ekonomi Sulsel sebesar 4,51%, diktribusi oleh empat sektor utama, Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Motor, Pertambangan & Penggalian, Konstruksi, serta Industri Pengolahan. Seperti juga umumnya perekonomian nasional dan daerah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan meskipun *share*-nya besar, tetapi tidak memiliki daya dorong yang signifikan pertumbuhan ekonomi Sulsel. Sebaliknya, Pertambangan & Penggalian dengan *share* relatif kecil, secara temporal sewaktu-waktu memberi efek dorongan yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi, terbesar kedua setelah Sektor Perdagangan di Sulsel.

Pergeseran struktur ekonomi menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan sumber pertumbuhan ekonomi di Sulsel, baik secara regional maupun sektoral. Pergeseran peran sektoral, dari kegiatan ekonomi primer ke kegiatan ekonomi sekunder dan jasa-jasa. Kecenderungan ini secara fundamental juga ditunjukkan peran wilayah kabupaten/kota. Dominasi perekonomian perkotaan yang didukung pertumbuhan pesat ekonomi perdesaan dengan berbagai dinamikanya, memberi optimisme kembalinya akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Sulsel. Hanya saja, memburuknya kinerja sektor industri pengolahan, menyebabkan proses perubahan struktur ekonomi dan transformasi ekonomi Sulsel tidak berjalan sebagaimana mestinya. Struktur perekonomian Sulsel tidak bergeser dari sektor primer (pertanian) ke sektor sekunder (industri). Ini terjadi akibat industri pengolahan mengalami perlambatan pertumbuhan, sehingga perannya mengalami penurunan signifikan, baik share-nya terhadap PDRB maupun terhadap pertumbuhan ekonomi.

Fakta ini menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama perekonomian Sulsel adalah menggerakkan sektor industri pengolahan. Stagnasi sektor industri pengolahan merupakan signal kuat tidak berjalan mulusnya perubahan struktur dan transformasi ekonomi di Sulsel, masih menghadapi berbagai hambatan. Kondisi ini terkait erat dengan struktur industri pengolahan yang tidak cukup kuat. Selama puluhan tahun, industri pengolahan di Sulsel tidak mengalami diversifikasi industri dan hanya bergantung pada dua jenis industri saja, yaitu industri makanan dan minuman serta industri barang galian bukan

logam. Struktur industri pengolahan yang hanya ditopang oleh dua jenis industri, tentu saja sangat rentan terhadap gejolak. Jika keduanya mengalami goncangan, maka kinerja industri pengolahan secara keseluruhan akan goyah. Perlu mendorong pengembangan berbagai jenis industri yang cukup potensial di Sulsel, seperti industri tekstil dan pakaian jadi, industri alat angkutan, industri furnitur, dan industri kulit, serta berbagai industri potensial dari komoditas unggulan daerah Sulsel

Selain itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap harus mendapatkan perhatian serius dari para pengambil kebijakan mengingat sektor ini sangat penting dan strategis bagi perekonomian Sulsel. Fakta menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulsel sangat rentan terhadap gejolak sektor ini, sementara sektor ini cenderung tumbuh tidak stabil dan fluktuatif. Untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di masa depan, beberapa upaya yang dapat dilakukan, antara lain: (i) mendorong pengembangan komoditas berbasis perikanan dan kelautan, seperti rumput laut, udang, dan ikan tuna; (ii) mendorong hilirisasi industri komoditas unggulan guna meningkatkan nilai tambah, memperkuat daya saing, dan menciptakan lapangan kerja, seperti rumput laut, jagung dan kakao; serta (iii) melakukan gerakan revitalisasi berbagai komoditas unggulan, seperti kakao dan kopi robusta dengan melakukan peremajaan dan penggantian bibit tanaman. Pada saat yang sama peningkatan produktivitas daerah dengan mendorong penguatan IPTEK dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Telah Dibuka
**Program Studi
Doktor Manajemen**
Perbanas Institute

Tahun ajaran 2024-2025
Pendaftaran Mulai September 2024
Kuliah dimulai Oktober 2024

Sekolah Pascasarjana

- ✓ Magister Akuntansi
- ✓ Magister Manajemen
- ✓ Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk)

Daftar di



admisi.perbanas.id



Info lebih lanjut
0851 7985 3803



Visit our website for more
www.perbanas.id



www.perbanas.id
perbanas.institute

Orkestrasi Pembangunan Ibukota Nusantara untuk Indonesia

Oleh: **Ilham Hasura M, S.E., M.Ec.Dev.**

Analisis Kebijakan Pertama Kemenko Perekonomian/ PMO

Kepala Subdivisi Percepatan Proyek Strategis Nasional Sektor Irigasi, Ibu Kota Nusantara, dan Food Estate Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

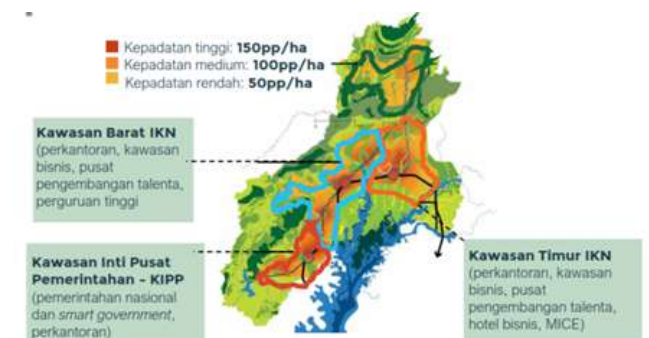
Pada Agustus 2019, Presiden Joko Widodo memberikan kejutan kepada kita semua berupa rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke sebuah lokasi baru di Pulau Kalimantan. Salah satu tujuan atas pemindahan ibu kota ini adalah untuk menciptakan *growth pole* baru di luar pulau Jawa, yang tentunya besar harapan akan meredistribusi kepadatan penduduk yang otomatis akan meredistribusi input-output perekonomian. Sambil menyelam minum air, tujuan lain yang tidak kalah mulia adalah untuk menyelamatkan Jakarta yang di beberapa lokus terjadi *Land Subsidence* 5-12 cm tiap tahunnya (ESDM, 2019).

Pembangunan IKN diharapkan memberikan berbagai dampak positif dan manfaat lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak sosial- ekonomi dari pengembangan Ibu Kota Nusantara sangatlah signifikan. Selain memberikan peluang investasi baru dan lapangan kerja di wilayah baru, juga memberikan kesempatan bagi pengembangan sektor-sektor lain seperti industri konstruksi, perumahan, transportasi, dan pariwisata di Kalimantan Timur. Hal ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi regional, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Untuk Kalimantan Timur sendiri dengan adanya pembangunan IKN, pada kuartal pertama 2024 telah dicatat pertumbuhan investasi asing 7,30% (yoy), dimana peningkatan PMA nya sendiri sampai menyentuh angka 16,7% (yoy) (Kaltim, 2024). Selain itu terdapat Visi IKN yang tentunya akan menjadi penggerak perekonomian Indonesia di Masa Depan.

Meski demikian, pembangunan Ibu Kota Negara yang kemudian dikenal dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukanlah hal mudah. Bahkan untuk memenuhi *due date* upacara 17 Agustus 2024 yang rencananya akan dilaksanakan di sana, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Setidaknya terdapat dua tantangan besar dalam pembangunan IKN. Tantangan besar pertama yang perlu dihadapi adalah manajemen biaya. Biaya pembangunan yang diestimasi mencapai Rp 466 Triliun perlu dieksplorasi sumber pembiayaannya (IKN, 2021). Pemerintah sampai Desember 2023 telah menganggarkan Rp 68 Triliun dari APBN untuk memenuhi pembangunan fasilitas dasar dan gedung pemerintahan (PUPR, 2023). Pemerintah harus melakukan pengelolaan keuangan yang hati-hati dan transparan untuk mengatasi risiko keuangan yang terkait dengan proyek ini, termasuk di dalamnya berupa pengembangan *creative financing* yang perlu dieksplorasi, misalkan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, *Land Value Capture*, dan skema pendanaan lainnya. Tantangan besar kedua adalah manajemen penyediaan lahan. Rencana lahan IKN seluas 256.142 Ha yang sebagian besar berasal dari tanah kawasan hutan memerlukan penanganan khusus baik berupa kehati-hatian dalam pengadaan tanahnya, maupun penanganan dampak sosial apabila terdapat penguasaan lahan oleh masyarakat di atasnya. Selain itu, tantangan lain misalnya tantangan sosio-kultural dan tantangan manajemen risiko lingkungan juga menjadi suatu hal lain yang perlu diselesaikan dengan skema yang seksama.



Gambar 1. Visi IKN (Otorita IKN, 2022)



Gambar 2. Rencana Pembagian Zonasi IKN (Bappenas, 2021)

Pemerintah telah menyiapkan berbagai regulasi yang menguatkan pembangunan IKN untuk menghadapi tantangan- tantangan yang telah diidentifikasi sejak awal. Pembangunan yang telah dilindungi dengan UU No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, juga di dukung dengan peraturan di bawahnya, seperti PP No. 17 Tahun 2022 yang memberikan spesialisasi pendanaan terhadap pembangunan IKN, PP No. 12 Tahun 2023 yang memberikan kemudahan berusaha dan penanaman modal di IKN, Perpres No. 62 Tahun 2022 tentang Otorita IKN, dan Perpres No. 65 Tahun 2022 yang mengatur penyediaan tanah untuk pembangunan IKN. Lebih dari pada itu, IKN telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional berdasarkan Permenko Perekonomian No. 21 Tahun 2022 demi akselerasi pembangunan. Dengan masuknya IKN ke dalam daftar PSN, maka pembangunannya mendapatkan fasilitas kemudahan sesuai dengan pengaturan pada PP No. 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional. Kemudahan yang didapat untuk dapat akselerasi pembangunan beberapa diantaranya: orkestrasi *debottlenecking* permasalahan pembangunan oleh KPPIP (bersama dengan Otorita IKN dan kementerian PUPR dalam konteks pembangunan saat ini), pengadaan tanah yang difasilitasi oleh Lembaga Manajemen Aset Negara, dan kesesuaian tata ruang dalam pembangunan.

Dengan penguatan regulasi yang telah dijelaskan sebelumnya, setidaknya beberapa infrastruktur dasar, seperti listrik, air bersih, sanitasi, dan beberapa fasilitas penunjang lainnya diperkirakan secara fungsional dapat mengakomodir kebutuhan pelaksanaan pemindahan ASN tahap pertama dan penyelenggaraan HUT ke-79 Indonesia. Istana negara dan fasilitas lain di sekitarnya telah mencapai 82,7% (PUPR, Juli 2024). Air bersih (direncanakan standar layak minum) yang berasal dari Intake Sepaku dengan kapasitas sementara 150 liter/ detik saat ini tengah menjalani uji komisioning. Uji ini untuk memastikan kelayakan air dan kelayakan sistem perpipaan untuk mengurangi tingkat kebocoran. Ditargetkan seluruh rangkaian uji ini akan selesai sebelum bulan Juli berakhir. Beberapa target lain misalnya untuk jalan tol akses IKN akan difungsionalkan sebagian, blok kantor Kemenko secara bertahap sementara sudah dapat mengakomodir perpindahan sebagian ASN, rumah hunian menteri dan sebagian ASN juga telah disiapkan walaupun belum seluruhnya selesai.

Walaupun fakta di lapangan menunjukkan kesiapan pembangunan untuk penyelenggaraan HUT RI, namun berbagai pembangunan dalam jangka panjang perlu terus diakselerasi untuk mengakomodir kebutuhan ASN yang akan dipindahkan dalam jangka panjang. Sudah menjadi tugas bersama seluruh elemen masyarakat untuk terus berorkestra akselerasi pembangunan IKN. Disatu sisi, pemerintah terus berupaya untuk menyelesaikan isu permasalahan yang dapat menghambat pembangunan. Pemerintah terus mencoba untuk saling berkoordinasi menyelesaikan isu percepatan pengadaan tanah karakteristik khusus, misalnya tanah kawasan hutan, bekas tanah transmigran, dan tanah aset negara agar dapat segera dibebaskan. Misalnya saat ini pemerintah terus berupaya menyelesaikan pengadaan tanah untuk pembangunan transmisi air bersih yang berasal dari Bendungan Sepaku Semoi. Lebih lanjut, pemerintah memberikan kepastian hukum kepada para pemangku kepentingan, dengan strategi reformasi regulasi yang dibutuhkan. Dengan mempercepat proses perizinan dan memperkuat regulasi, diharapkan investasi swasta dapat lebih mudah masuk dan mendukung pembangunan infrastruktur di IKN.

Di sisi lain, penting untuk melibatkan berbagai pihak dalam proses pembangunan IKN. Partisipasi masyarakat, NGO, akademisi, dan sektor swasta akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pembangunan IKN, termasuk memperkuat instrumen pembangunannya. masyarakat bersama akademisi dapat terus memberikan pengawasan dan masukan terhadap pembangunan, termasuk dapat memberikan masukan terhadap penyelesaian isu yang ada. Selain itu, penyiapan hilir juga perlu dilakukan, program pelatihan dan pendidikan untuk tenaga kerja lokal perlu ditingkatkan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran di Kalimantan Timur masih cukup tinggi, mencapai 7,3% pada tahun 2022. Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja di IKN ke depannya, diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Ini akan meneruskan kebijakan prioritas penggunaan tenaga kerja lokal yang telah dilakukan pada masa pembangunan saat ini.

Orkestrasi yang baik dari seluruh elemen kemasyarakatan pada akhirnya diharapkan mampu mengakselerasi pembangunan. Selain itu, pengawasan yang baik dari lembaga yang berwenang atau masyarakat langsung tentunya akan mengeliminasi, atau setidaknya meminimalisir isu

lingkungan dan dampak sosial yang berpotensi mungkin terjadi. Pada akhirnya, orkestrasi berbagai elemen inilah yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan IKN. Keberhasilan inilah yang akan mewujudkan visi dan tujuan awal dibangunnya IKN.

Dampak Sosial-Ekonomi 17 Titik Pembangunan di Kota Surakarta

Oleh **Dr. Mulyanto, ME.**

Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta
Ketua Bidang Kajian dan Publikasi ISEI Surakarta

Arah pembangunan Kota Surakarta selama tahun 2021-2026 di bawah kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa (Gibran-Teguh) dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2021–2026.

Visi Kota Surakarta berdasar Perda tersebut adalah: “Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera”. Visi ini kemudian dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) misi. Ketujuh misi ini kemudian dijabarkan lagi ke dalam: (i) Tujuan, (ii) Sasaran (BAB V RPJMD: Visi-Misi), (iii) Program dan Kegiatan (BAB VII RPJMD: Kinerja Program Organisasi Perangkat Daerah), dan (iv) Indikator Makro Daerah (BAB VIII RPJMD dan PP Nomor 13 Tahun 2019: Kinerja Makro Daerah). Dalam mencapai visi sebagai Kota Budaya yang Modern, Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta, selain menggunakan simbol resmi, juga menambah dengan 2 (dua) desain berupa desain logo (*Solo the Spirit of Java*) dan desain maskot (Canthik Rojomolo). Simbul Pemkot, Desain Logo, dan Desain Maskot, selengkap-lengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1 (Gambar 1.a, Gambar 1.b, dan Gambar 1.c). Keberadaan simbul, logo dan maskot ini, diharapkan akan semakin memperkenalkan Kota Surakarta kepada banyak pihak, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Tulisan ini secara umum akan mengaitkan misi ke-2 dalam dokumen RPJMD Kota Surakarta (Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan) dan misi ke-6 (Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif) dengan keberadaan 17 titik pembangunan di Kota Surakarta, serta dampaknya bagi kinerja sosial-ekonomi Kota Surakarta di bawah komando Gibran-Teguh, selama kurun waktu 2021-2023

Sebagaimana yang diungkapkan dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPj) Kota Surakarta Tahun 2023 (hal. I-10 s/d I-17), telah ditetapkan sasaran pembangunan di Kota Surakarta yang diprioritaskan pada 17 titik pembangunan. Ke-17

titik pembangunan tersebut adalah:

1. Pembangunan *Elevated Railway* Simpang Tujuh Joglo (Dana APBN),
2. Masjid Raya Sheikh Zayed (Dana Hibah Luar Negeri / Hibah UEA),
3. Pembangunan *Islamic Center* (Dana Hibah Luar Negeri / Hibah UEA),
4. Revitalisasi Sentra Industri Kecil, Menengah (IKM) Mebel Srikayu Gilingan (Dana APBD dan APBN),
5. Revitalisasi Pasar Jongke (Dana APBN),
6. Revitalisasi Shelter Manahan (Dana APBD),
7. Revitalisasi Ngarsopuro dan Koridor Gatot Subroto (Dana APBD),
8. Revitalisasi Kebun Binatang Jurug / Solo Safari (Kemitraan dengan Pihak Ketiga),
9. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTsa) Putri Cempo (Kemitraan dengan Pihak Ketiga / PT. Solo Citra Metro Plasma Power (PT. SCMPP),
10. Penataan Kawasan Kumuh Semanggi-Mojo (Dana APBD dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga),
11. Revitalisasi Keraton Kasunanan Surakarta (Dana APBD dan APBN),
12. Revitalisasi Taman Balekambang (Dana APBN),
13. Revitalisasi Pura Mangkunegaran (Dana APBD dan APBN),
14. Revitalisasi Lokananta (Dana APBD dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga),
15. Revitalisasi GOR *Indoor* Manahan (Dana APBD dan Hibah Luar Negeri / Hibah UEA),
16. Pembangunan Museum Budaya, Sains dan Teknologi (*Cultural Science and Technology Museum*) (Kemitraan dengan Pihak Ketiga / Mayapada (Sri Dato Tahir)),
17. Revitalisasi *Technopark* (Kemitraan dengan Banyak Pihak).

Hingga tulisan ini dibuat (pertengahan Juli 2024), belum semua titik pembangunan tersebut dalam kondisi selesai, sehingga akan menjadi Pekerjaan Rumah (PR) tersendiri bagi penerus pasangan Gibran-Teguh. Misalnya untuk proyek pembangunan nomor 3 (Pembangunan Islamic Center) dan nomor 15 (Revitalisasi GOR Indoor Manahan) saat ini belum selesai, begitu juga untuk proyek nomor 16

(Pembangunan Museum Budaya, Sains dan Teknologi) saat ini sedang berlangsung pembangunan/pengerjaannya.

Terlepas dari adanya beberapa titik kelemahan dan kritik yang ditujukan kepada pasangan Gibran-Teguh, misalnya dampak pembangunan Masjid Raya Sheikh Zayed telah menimbulkan titik kemacetan baru, penekanan pada 17 titik pembangunan tersebut telah berdampak terhadap kinerja sektoral dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Surakarta selama kurun waktu 2021-2023.

Penekanan pada 17 titik pembangunan yang menyangkut aspek pendukung infrastruktur (No.1), pendukung kegiatan religi (No.2 & 3), pendukung aktifitas perdagangan (No.4-7), pendukung aktifitas rekreasi / pariwisata (No.8), pendukung energi terbarukan (No.9), penataan area kumuh / kawasan perumahan (No.10), pendukung aktifitas budaya (No.11-14), serta pendukung seni, olahraga, dan IPTEKS (No.15-17), telah mampu merubah struktur perekonomian di Kota Surakarta yang dominan pada Sektor Kontruksi (Sektor Nomor 6 / Sektor F dalam PDRB). Rerata sumbangan sektor ini selama kurun waktu 2021-2023 sebesar 23,62%. Artinya aktivitas perekonomian di Kota Surakarta selama kurun waktu 3 tahun masa kepemimpinan Gibran-Teguh, hampir $\frac{1}{4}$ -nya (mendekati 24%) didominasi oleh keberadaan Sektor Kontruksi. Selengkapnya lihat Gambar 2.

Sektor yang memberikan sumbangan besar setelah Sektor Kontruksi, yaitu Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Sektor G) yang memberikan sumbangan sekitar 22,45%; dan Sektor Informasi dan Komunikasi (Sektor J) dengan kontribusi sekitar 19,03%. Sebaliknya, sektor yang mengalami tumbuh pesat selama kurun waktu 2021-2023 adalah Sektor Transportasi dan Pergudangan (Sektor H), dengan daya tumbuh secara rerata sebesar 46,82% dan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Sektor I) daya tumbuhnya sebesar 21,22%.

Dampak lainnya yaitu berupa kinerja sosial-ekonomi makro yang menurut amanah dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam Pasal 6, yang memuat kinerja makro

daerah yang meliputi: (i) Pertumbuhan Ekonomi, (ii) Pendapatan per Kapita, (iii) Angka Pengangguran, (iv) Angka Kemiskinan, (v) Ketimpangan dalam Distribusi Pendapatan, dan (vi) Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kinerja sosial-ekonomi Kota Surakarta selama kurun waktu 2021-2023 jika dibandingkan dengan daerah lain di kawasan Soloraya atau kawasan Subosuka_Wonosraten (Kota Surakarta, Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Wonogiri, Kab. Sragen, dan Kab. Klaten), menghasilkan simpulan yang menarik (selengkapnya lihat Tabel 1).

Dari Tabel 1, dapat dilihat bahwa Kota Surakarta unggul dalam hal pencapaian pada 2 kinerja makro sosial-ekonomi, yaitu: (i) Capaian kinerja PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 (dalam satuan juta rupiah), dan (ii) Capaian kinerja dalam kualitas sumber daya manusia, yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di lain pihak, Kota Surakarta masih tertinggal dalam pencapaian kinerja sosial-ekonomi di 2 aspek, yaitu: (i) Capaian penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka / TPT (dalam satuan persen), dan (ii) Capaian kinerja ketimpangan dalam distribusi pendapatan yang diukur dengan besaran *Gini Ratio* (satuan indeks).

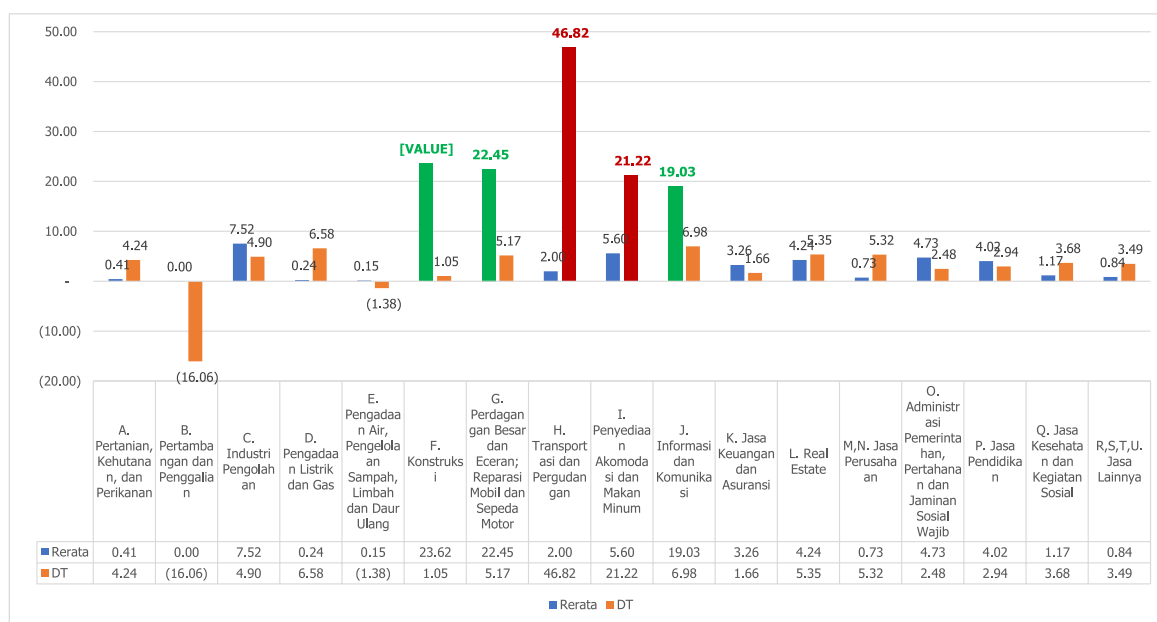
Dari serangkaian pembahasan berdasarkan pada dokumen perencanaan pembangunan, penekanan pada 17 titik pembangunan, serta berbasis pada data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2021-2023, dapat disimpulkan bahwa pembangunan di Kota Surakarta, sudah menampakkan hasil yang baik dari sisi peningkatan pendapatan perkapita penduduk dan kinerja peningkatan dalam kualitas sumber daya manusianya (diukur dengan IPM), akan tetapi masih meninggalkan PR yang besar dalam hal upaya menurunkan besaran TPT dan upaya memperkecil tingkat ketimpangan dalam distribusi pendapatan.

Oleh karenanya, kepada penerus pasangan Gibran-Teguh, kondisi ini harus menjadi perhatian yang besar, sehingga pembangunan selain akan mampu meningkatkan kinerja ekonomi, juga diharapkan mampu membawa peningkatan kesejahteraan yang semakin merata bagi penduduk / warga di Kota Surakarta. Jika hal ini terjadi, maka capaian misi ke-2, yaitu upaya untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi

yang adaptif dan berkelanjutan, dan misi ke-6, yaitu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif; niscaya akan semakin mendekati kenyataan.

Untuk mencapai kondisi di atas, maka beberapa saran / rekomendasi yang dapat diberikan, yaitu: (i) Kepada Mas Gibran yang pada 20 Oktober 2024 akan dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, sebaiknya tetap mempunyai komitmen yang tinggi atas terselesainya semua titik pembangunan yang telah dirancang di atas, (ii) Mas Gibran sebaiknya juga menyempatkan waktu untuk terus memantau bahwa 17 titik pembangunan tersebut, selain selesai juga mempunyai dampak positif terhadap peningkatan kinerja sosial-ekonomi di Kota Surakarta agar membaik kondisinya dari waktu ke waktu, (iii) Masalah tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang secara

persentase masih tertinggi di kawasan Soloraya, semoga bisa terpecahkan dengan telah beroperasi / berjalannya 17 titik pembangunan di atas, (iv) Kepada pasangan penerus Mas Gibran hasil pemilu pada Nopember 2024, diharapkan dapat meneruskan sekaligus menjaga keberlangsungan 17 titik pembangunan di atas, termasuk penyediaan anggaran dalam APBD Kota Surakarta untuk beban pemeliharaan sekaligus untuk menjamin bahwa 17 titik pembangunan di atas mempunyai keberlanjutan yang tinggi pada masa-masa mendatang, terakhir (v) kepada masyarakat Kota Surakarta khususnya, semoga bisa memanfaatkan hasil-hasil pembangunan di atas dengan cara terus mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan juga mengembangkan industri kreatif di Kota Surakarta, sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dari waktu ke waktu.



Gambar 2

Rerata Kontribusi dan Daya Tumbuh Sektoral Pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Surakarta Tahun 2021-2023 (dalam satuan persen) (data diolah dari <https://jateng.bps.go.id/indicator/157/1341/1/-seri-2010-pdrb-atas-dasar-harga-konstan-menurut-lapangan-usaha-kota-surakarta.html>)

Tabel 1. Indikator Makro Ekonomi dan Sosial di Kawasan Soloraya / Kawasan Subosuka_Wonosraten, Rerata Tahun 2020-2023

No.	Kabupaten / Kota di Soloraya	Laju Pertumbuhan PDRB (Persen)		PDRB Perkapita ADHK 2010 (Juta Rupiah)		Tingkat Pengangguran Terbuka / TPT (Persen)		Persentase Penduduk Miskin (Persen)		Ketimpangan / Gini Ratio (Satuan Indeks)*		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	
		Rerata	Ran-king	Rerata	Ran-king	Rerata	Ran-king	Rerata	Ran-king	Rerata	Ran-king	Rerata	Ran-king
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Kota Surakarta	3,52	3	71.51	1	6.55	7	8,93	2	0.39	7	82.86	1
2.	Kabupaten Boyolali	3.85	1	22.57	6	4.84	4	10.11	3	0.37	3	74.76	5
3.	Kabupaten Sukoharjo	3.20	6	31.02	2	4.03	2	7.78	1	0.38	6	77.68	2
4.	Kabupaten Karanganyar	3.28	4	29.66	3	5.48	6	10.15	4	0.38	5	76.44	4
5.	Kabupaten Wonogiri	3.14	7	20.98	7	2.64	1	11.09	5	0.35	2	70.94	7
6.	Kabupaten Sragen	3.23	5	28.66	4	4.52	3	13.26	7	0.33	1	74.45	6
7.	Kabupaten Klaten	3.56	2	23.23	5	4.86	5	12.75	6	0.37	4	76.56	3

Catatan: *) Khusus data Indeks Gini (Gini Ratio), adalah data rerata selama kurun waktu 2021-2023.

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024 dalam <https://jateng.bps.go.id/indicator/>

Mengurangi Jawa Sentris: IKN sebagai Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi Baru di Indonesia

Oleh Nungki Pradita, S.E., M.M.

Pengurus ISEI Semarang & Dosen FEB UNISBANK

Prof. Dr. Euis Soliha, S.E., M.Si.

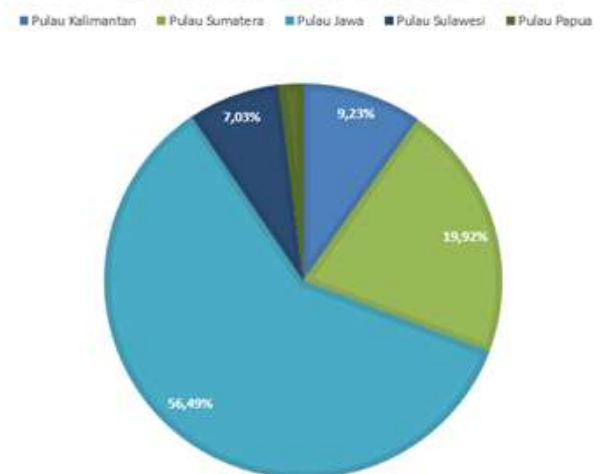
Wakil Sekretaris II ISEI Semarang & Guru Besar FEB UNISBANK

Selama Indonesia Merdeka, Pulau Jawa menjadi pusat gravitasi (Jawa-Sentris) segala aspek kehidupan di Indonesia. Jawa-Sentris ini merupakan fenomena kecenderungan memusatkan dan dominasi pada budaya dan kepentingan Jawa dalam konteks nasional Indonesia. Hal ini tidak terjadi begitu saja melainkan melalui sejarah yang panjang. Tidak hanya dari Indonesia Merdeka namun juga dari masa-masa kerajaan di Nusantara. Pada masa kerajaan Mataram Islam dan Majapahit yang terletak di Jawa memainkan peran pentingnya, yaitu dalam mempersatu dan pembentuk identitas budaya. Hal inilah yang menjadi akar Jawa-Sentris hingga saat ini.

Pengaruh Jawa-Sentris ini sangat terasa dalam aspek kehidupan di Indonesia hingga kini. Tidak hanya bahasa, politik, kebudayaan, pendidikan namun juga ekonomi. Dalam politik elit Jawa telah lama memegang peran sentral dalam kepemimpinan negeri ini selama puluhan tahun. Dalam Pendidikan pulau Jawa menjadi pusat dan rujukan pendidikan yang dianggap bagus di negeri ini. Dalam bidang ekonomi pulau Jawa juga mendominasi. Berdasarkan data BPS yang diperbarui Februari 2024 dengan luas daratan hanya 7% dari luas daratan Indonesia menghasilkan 56,5% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Maka hal ini memicu ketimpangan dan berpotensi tidak terlaksananya sila kelima Pancasila (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) karena pulau Jawa akan tetap mendominasi sementara wilayah lain tertinggal. Namun dengan pembangunan Ibu Kota Nasional (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur menandakan akan dimulainya pergeseran menuju pembangunan Indonesia yang lebih merata dan berkeadilan.

Berdirinya IKN Nusantara bukan sekedar memindahkan pusat pemerintahan saja namun juga syarat dengan keinginan Indonesia untuk mencapai keadilan dan pemerataan bagi seluruh wilayah. Terletak di jantung Kalimantan, IKN Nusantara juga terletak di tengah-tengah wilayah Indonesia. Dengan ini diharapkan IKN Nusantara menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi

SUMBANGAN PDB INDONESIA 2022



Gambar 1.
Sebaran PDB Indonesia berdasarkan lima pulau besar

baru yang mengantarkan Indonesia menjadi negara yang adil bagi seluruh rakyatnya dan kuat di mata dunia.

Menuju Indonesia yang Lebih Simbang

Ketimpangan ekonomi di Indonesia ini menjadi pusat perhatian utama pemerintah sejak lama. Banyak cara dan kebijakan yang telah dilakukan pada setiap era kepemimpinan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi. Seperti pada era Presiden Soeharto dan B.J Habibie yang merupakan periode penting dengan pembuatan kebijakan yang berusaha menyeimbangkan ketimpangan ekonomi meskipun dengan cara yang berbeda. Era kepemimpinan presiden Suharto (1967-1998): Transmigrasi, Kebijakan Ekonomi Berdikari dan Pemerataan Akses Pendidikan. Era Presiden B.J Habibie (1998-2001): Otonomi Daerah, Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM), Jaringan Pengaman Sosial. Dan Kembali pada era kepemimpinan Presiden ke 7 Joko Widodo dengan mencetuskan salah satunya pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur dengan nama Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal ini dilakukan karena pertimbangan beberapa aspek yang menjadi bukti bahwa terdapat fenomena Jawa-Sentris hingga sekarang.

Tabel 1. Bukti Ketimpangan ekonomi Indonesia

Aspek	Dampak
Produk Domestik Bruto Nasional (PDB)	Pulau Jawa menyumbang lebih dari 56,5% PDB nasional, sementara luas daratannya hanya 7% dari total Indonesia.
Investasi	Investasi terkonsentrasi di Pulau Jawa, sedangkan daerah lain kekurangan modal untuk pembangunan ekonomi.
Tenaga Kerja	Kesenjangan ekonomi mendorong migrasi massal ke Pulau Jawa, sehingga menimbulkan masalah pengangguran di daerah asal dan kepadatan penduduk di Pulau Jawa.
Infrastruktur	Infrastruktur transportasi, pendidikan, dan kesehatan lebih berkembang di Pulau Jawa dibandingkan wilayah lain.

Tidak hanya menjadikan daerah lain di luar Jawa tertinggal, fenomena Jawa-Sentris juga memicu permasalahan bagi pulau jawa sendiri, seperti polusi, kemacetan dan kepadatan penduduk. Maka dengan Pembangunan IKN ini diharapkan dapat menyeimbangkan peta ekonomi Indonesia. Dengan pemindahan pusat pemerintahan ke bagian tengah dari Indonesia pembuat kebijakan berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di luar pulau Jawa, mengembangkan daerah di seluruh wilayah Indonesia serta hasil akhirnya mampu mensejahterakan secara merata rakyat Indonesia.

Peluang Ekonomi Baru: IKN Nusantara

Dibangunnya IKN Nusantara bukan hanya sekedar kota administrasi saja melainkan dirancang lebih dari itu. IKN Nusantara dirancang sebagai masa depan dengan teknologi tinggi yang memiliki kecerdasan, keberlanjutan dan inklusivitas. Dengan adanya IKN Nusantara akan menjadi peluang ekonomi baru seperti industri teknologi tinggi, ekonomi kreatif bahkan pariwisata. Saat ini dengan berbagai skema pemerintah merancang insentif dan kemudahan bagi investor yang berinvestasi di IKN Nusantara. Hal ini dilakukan dengan harapan mampu menarik investasi besar-besaran sehingga menciptakan banyak lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional serta nasional.

Dampak Positif IKN Nusantara bagi Seluruh Indonesia

Pembangunan IKN Nusantara yang dilakukan di tengah-tengah Indonesia ini tidak hanya berdampak bagi Kalimantan Timur saja, melainkan seluruh wilayah di Indonesia. Dengan Pembangunan lokomotif pertumbuhan ekonomi baru di tengah ini diharapkan akan meningkatkan konektivitas antar daerah, pemerataan berbagai aspek kehidupan, membuka peluang pasar baru serta mendorong diversifikasi ekonomi. Sehingga dapat mewujudkan Indonesia

emas dengan lebih adil dan Sejahtera, dimana seluruh warga negara memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk meraih kesejahteraan.

Bersatu Padu Membangun Masa depan Gemilang

Pembangunan IKN Nusantara merupakan proyek nasional yang membutuhkan kerjasama sama dari berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah melainkan juga pihak swasta dan Masyarakat secara umum harus turut andil bergotong-royong untuk mewujudkan visi IKN Nusantara sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan komitmen, gotong royong serta kerja keras bersama IKN Nusantara akan menjadi simbol nyata bagi Indonesia yang maju, adil dan Sejahtera untuk menjadikan masa depan yang gemilang menuju Indonesia EMAS 2045.

Implikasi IKN Nusantara bagi Jawa Tengah

IKN Nusantara tidak hanya memiliki potensi untuk menjadi pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia, namun juga berimplikasi bagi Jawa Tengah. Dengan dibangunnya IKN Nusantara akan membuka peluang ekonomi baru bagi Jawa Tengah untuk memasarkan produk dan jasa ke IKN Nusantara. Banyak sektor yang dihasilkan di Jawa Tengah seperti manufaktur, pertanian maupun perikanan yang dapat dipasarkan di IKN Nusantara. Selain peluang pemasaran produk IKN Nusantara juga berimplikasi terhadap pembangunan infrastruktur sehingga akan mempermudah konektivitas antar daerah terutama Jawa Tengah dan Kalimantan Timur. Maka untuk merasakan Implikasi tersebut Jawa Tengah perlu proaktif dalam memanfaatkan peluang dan mitigasi risiko terkait dengan adanya IKN Nusantara. Dengan langkah yang tepat Jawa Tengah akan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia mendatang.

Tingkatkan Profesionalitas dan Kredibilitas Melalui Sertifikasi di **LSP LSPP**

LSP LSPP (Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan) adalah lembaga yang melaksanakan sertifikasi profesi di bidang perbankan. Sertifikasi LSP LSPP diakui oleh otoritas dan pelaku industri keuangan dalam rangka standarisasi kompetensi SDM perbankan.

Bidang Kompetensi



**Manajemen
Risiko Perbankan**



Operation



Wealth Management



General Banking



Audit Intern Bank



Kepatuhan & APU/PPT



Funding & Services



Kredit Perbankan

Info Lebih Lanjut:

Contact Us ➔



Phone Number:
(021) 75901547



Website:
www.lspp.or.id

Menggapai Makan Siang Gratis yang Amanah, Efektif dan Efisien

Oleh **Aldrin Herwany, Ph.D.**

Anggota Bidang III Pengurus Pusat ISEI, Dosen IKPIA Perbanas, dan
Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI New Delhi, India

Kata *amanah* mempunyai arti yang sangat dalam, ketika diimplementasi dalam kehidupan mempunyai arti ikhlas tingkat tinggi serta melakukan pekerjaan tidak didorong keinginan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya seperti sebuah korporasi dan hanya menjalankan pesan Ilahi untuk berbuat sebanyak banyak manfaat untuk orang lain. Konsep efektif dan efisien pada makan siang gratis lebih menggambarkan sesuatu yang tidak membazir baik dalam hal biaya maupun waktu.

Kita ambil satu percontohan makan siang gratis yang sudah ada, yakni India yang notabene negara dan karakteristik kehidupan sosial hampir paling mirip dengan Indonesia. Pemandangan pembagian makanan gratis merupakan sebuah kebiasaan mulia di India, dengan mudah kita akan menemukan antrian orang menunggu pembagian makanan gratis oleh salah satu individu masyarakat di seluruh negara bagian India, artinya sifat saling berbagi dan peduli di kalangan masyarakat India adalah sesuatu yang biasa dan bukan hal yang luar biasa sehingga tidak mengherankan India sudah lebih dahulu mempunyai skema pembagian makan gratis untuk orang tidak mampu. Selain itu dalam beberapa hal yang perlu dipertimbangkan matang dalam skema pemberian makan gratis (baca: bergizi) di Indonesia adalah perbedaan situasi kedua negara dimana kondisi geografis dimana India merupakan negara yang dominan daratan sehingga memudahkan distribusi makanan sementara Indonesia terdiri dari ribuan kepulauan sehingga diperlukan pemikiran konsep rantai pasok makanan yang lebih detail. Selanjutnya adalah masyarakat India lebih memilih makanan vegetarian sementara Indonesia tidak sehingga mau tidak mau akan meningkatkan sedikit biaya porsi per unit. Mari kita lihat satu persatu komponen yang berkontribusi untuk suksesnya program makan siang gratis untuk anak-anak Indonesia.

Pelaksana, kita cenderung lebih memilih sumber daya manusia yang sudah ada dan terbentuk sejak lama (baca: berpengalaman) dan salah satu pilihan dengan mengoptimalkan kinerja dinas-dinas Pendidikan



Kemendikbudristek yang ada di setiap kabupaten/kota. Argumentasinya adalah pemanfaatan SDM beserta perangkat organisasi yang sudah ada lebih minim cost ketimbang membentuk organisasi/Lembaga negara baru yang dimulai dari pembentukan sampai dengan pelatihan SDM dan lain-lain.

Dapur Umum, kita memerlukan dapur umum yang luas, besar dan bersih sehingga setiap pemda/pemkot diberi kesempatan untuk mengelolanya. Dalam hal ini Indonesia dapat meniru/replikasi apa yang sudah dilakukan oleh Achyuta Samanta seorang *educationist and philanthropist* berhati mulia dari negara bagian Odisha, India. Beliau juga selain sebagai salah seorang anggota parlemen India yang berasal dari keluarga sangat sederhana namun mampu membangun dapur umum (*India's Mega Kitchen*) untuk menyediakan makan gratis puluhan ribu orang golongan tidak mampu.

(lihat, <https://www.youtube.com/watch?v=wypm9BqR-gy0>).

Luar biasanya lagi, selain memberi makan beliau juga menyekolahkan para golongan tidak mampu sampai ke jenjang Perguruan Tinggi. Selain menyediakan tempat tinggal yang layak, Achyuta juga akhirnya berhasil membangun dua kampus besar yaitu *Kalinga Institute of Industrial Technology* (KITT) dan *Kalinga Institute of Social Sciences* (KISS) untuk terus menjaga kesinambungan kehidupan golongan tidak mampu menjadi lebih mandiri. Dalam konteks Indonesia, dirasa perlu mereplikasi model dapur umum diatas dan kelihatannya harus juga bekerjasama

dengan BPOM dan IDI cabang di Indonesia dalam menjaga kualitas makanan agar tetap bergizi. Selain itu Indonesia bisa belajar dengan organisasi keagamaan di India *The Akshaya Patra Foundation* dibawah Kementerian Pendidikan dengan *Mid Day Meal Program*

(lihat, <https://delhi.akshayapatra.org/>). Pembangunan Dapur Umum dapat diserahkan kepada Pemprov /Pemkab/pemkot.

Sumber Daya Pangan, dalam menjaga keberlangsungan (*sustainability*) bahan pangan (termasuk *supply chain management*) diperlukan kontribusi dari kerjasama yang dibangun lintas Kementerian (Pertanian dan BUMN), dengan kata lain dalam menjaga keberlangsungan rantai pasok makanan dari hulu sampai hilir termasuk Pemerintah Pusat khususnya dalam hal dapat membuat kebijakan konversi pajak keuntungan. Sebagai contoh Perusahaan swasta dapat berkontribusi pada program makan siang gratis, artinya siapapun Perusahaan yang ada di Indonesia boleh memilih tidak ingin menyetor pajak keuntungan (dikonversi menjadi bantuan program makan siang) atau tetap melakukan setoran pajak keuntungan. Selain konversi pajak pemerintah pusat juga bisa mengeluarkan aturan bagi Perusahaan BUMN dan Swasta untuk mengkonversi dana program *Corporate Social Responsibility (CSR)* menjadi program makan siang gratis (baca; penyediaan makanan).

Kolaborasi Kementerian, konsep gotong royong harus diimplementasikan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antar Kementerian sebab kita tahu bahwa tidak mudah untuk melaksanakan program makan gratis oleh satu Kementerian saja. Kementerian yang dilibatkan adalah Kemendikbudristek, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN dan Kemenpanrb.

Pendanaan, dalam hal berbagi sesama atau lebih dikenal dengan konsep sedekah atau sumbangan sukarela dimana pemerintah membuka akun resmi untuk Sumbangan Masyarakat secara suka rela dalam mensukseskan program makan gratis Indonesia. Para bapak/ibu rumah tangga tentunya tidak keberatan dengan sumbangan sukarela dalam membantuk anak anak Indonesia untuk menjadi sehat dan cerdas kedepan. Skema pendanaan seperti ini hanyalah merupakan pendukung saja dan tidak menjadi andalan

pemerintah Indonesia, karena tidak dapat dihindari bahwa anggaran APBN/APBD tetap menjadi andalan (utama).

Standar minimal harga satu porsi makanan, pemerintah juga harus menentukan sebenarnya berapa biaya satu porsi makanan yang memenuhi konsep 4 sehat 5 sempurna untuk satu pelajar sehingga memudahkan penyaluran bantuan makanan. Ketika standar minimal makanan sudah ada, maka untuk sekolah sekolah tertentu yang notabene pendanaannya mampu dan diatas rata-rata umumnya, mereka berhak menerima bantuan dari pemerintah berdasarkan standar minimum. Skema seperti ini untuk meminimalisir obrolan obrolan miring dari Masyarakat khususnya definisi dari makan sehat, artinya jika sebuah sekolah diberi kebebasan menambah asupan dengan biaya sendiri per-porsi. Dengan kata lain jika pihak sekolah ingin mempunyai menu yang lebih dari rata rata maka dipersilahkan untuk menyesuaikan sendiri dengan dana yang berasal dari kantong sekolah sendiri.

Pemberdayaan Infrastruktur Daerah yang sudah ada dilakukan sebelumnya seperti Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) demi menjamin keberlangsungan pasokan pangan dari sisi Hulu, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam membantu keikutsertaan pendanaan dalam hal konversi pajak keuntungan dan konversi Corporate Social responsibility (CSR) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam memudahkan pengawasan kualitas makanan dan rantai pasok pangan dan makanan pelajar Indonesia.

Pengawasan, kunci dari keberhasilan makan siang gratis ini tidak terlepas dari fungsi pengawasan yang ketat dan disiplin. Sekali lagi Kemendikbudristek Bersama dengan perangkat Dinas Pendidikan harus diperbantukan untuk mensukseskan program makan gratis di Indonesia.



Sebagai catatan para ASN (baca: lintas kementerian dan pemkot/pemkab) yang terlibat dalam program makan siang gratis sebaiknya mendapatkan reward kinerja tersendiri dan ini menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Kemenpanrb. Beban pekerjaan Kemendikbudristek tentunya semakin banyak dan berat terlebih harus menyelesaikan program Merdeka belajar sehingga cukup bijaksana jika pemerintah mengambil kebijakan Dimana Kementerian Pendidikan tinggi dipisah kembali dengan Pendidikan Tk sampai dengan jenjang SMA untuk bisa lebih fokus melahirkan ilmuwan-ilmuwan tingkat tinggikan berkelas dunia dalam mencari inovasi agar Indonesia mampu pindah status menjadi negara maju seperti yang dilakukan oleh Jepang dan Korea dimana ketika naik kelas menjadi negara maju mereka sudah punya merek-merek terkenal hasil inovasi seperti Sony, Toyota, Samsung, Hyundai, KIA dan lainnya. Kita berharap Kemdikbudristek-dikti dapat fokus penuh dengan bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) khusus dalam menemukan riset inovasi industri yang mengarah ke komersialisasi dan jika perlu *road to nobel prize*, Terakhir, Langkah

pemisahan Kementerian Pendidikan diatas demi menjaga momentum tibanya bonus demografi dan target negara menuju Indonesia Emas 2045, kita tidak perlu khawatir berlebihan menuju Indonesia makmur dan sejahtera kedepan, berpikir positif dan tidak buruk sangka akan jauh lebih mulia.

Sebagai tambahan, banyak keuntungan yang diperoleh ketika kita menggunakan skema diatas dimana tingkat kepercayaan Masyarakat baik penyumbang pajak, pelaku CSR akan meningkat dikarenakan persepsi positif tepat sasaran, selanjutnya pemberdayaan secara optimal kinerja ASN, optimalisasi dana APBN dan APBD semakin baik kedepan, Masyarakat penyumbang dana akan lebih Ikhlas karena tepat sasaran dan terakhir tentunya adalah implementasi konsep gotong royong yang menjadi roh dan warisan nenek moyang Indonesia akan terlaksana, terakhir konsep amanah akan mengajarkan kita untuk lebih ikhlas dalam melakukan sebuah pekerjaan. Semoga.

Disclaimer: Tulisan ini merupakan pendapat pribadi.

Perekonomian Aceh Menuju Kesejahteraan Masyarakat

Oleh **Aliasuddin, Ph.D.**

Ketua ISEI Banda Aceh & Dosen FEB Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Provinsi Aceh memang kaya akan sumberdaya alam baik yang bersifat sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resources*) dan sumberdaya alam yang mudah habis (*nonrenewable resources*). Selain itu, Aceh juga mendapatkan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) sejak tahun 2008 hingga tahun 2028 dengan dua fase berbeda, sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Periode pertama, Aceh mendapat DOKA sebesar dua persen dari DAU nasional sampai 2023 dan satu persen sejak 2024 sampai 2028. Jumlah DOKA yang sudah diterima oleh Pemerintah Aceh sampai tahun 2023 sebesar Rp 95,93 triliun. Jumlah DOKA ini sangat besar yang secara teoritis, anggaran pemerintah yang besar berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun Aceh mendapatkan anggaran dari DOKA yang sangat besar namun pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat masih belum mengalami perubahan yang signifikan. Persentase penduduk miskin masih besar, 14,24 persen pada Maret 2024. Kemiskinan terbesar justru di daerah pedesaan dengan 16,75 persen dan perkotaan sebesar 9,60 persen. Daerah pedesaan semakin merana walaupun anggaran belanja daerah sangat besar.

Aceh juga mempunyai potensi sumberdaya alam yang relatif besar. Sawit, misalnya, ada 258.992 Ha pada tahun 2022 dengan jumlah produksi sebanyak 459.727 ton. Namun, produktivitas kelapa sawit di Indonesia (3,31 ton/ha) lebih besar dari produktivitas sawit di Aceh (2,745 ton/ha). Kondisi ini memperlihatkan adanya masalah dalam produksi sawit di Aceh. Selain itu, Aceh juga memiliki produksi perikanan yang sangat besar. Misalnya tahun 2021, produksi perikanan laut sebesar 222.420 ton dengan nilai sebesar 6,343 triliun dan perikanan darat sebesar 17.514 ton dan nilai sebesar 688 miliar. Ini hanya contoh beberapa produksi dari sumberdaya alam yang dapat diperbaharui. Aceh mempunyai cadangan minyak dan gas dengan potensi yang sangat besar baik yang sudah diproduksi maupun yang belum. Berbagai potensi yang dimiliki Aceh namun tingkat kemiskinan masih sangat besar dan tertinggi nomor satu di Pulau Sumatera. Kondisi ini

sangat paradoks antara potensi dan kenyataan bahwa Aceh masih mengalami persoalan kesejahteraan yang masih sangat rendah. Mengapa kemiskinan di Aceh masih tetap besar meski Aceh mendapatkan DOKA besar dan didukung oleh potensi sumberdaya alam?

Identifikasi Penyebab Kemiskinan

Aceh masih berkutut dengan kemiskinan yang besar padahal Aceh memiliki sumberdaya alam yang relatif besar didukung oleh pendanaan dari pengeluaran pemerintah yang sangat besar juga. Ada beberapa faktor yang teridentifikasi menjadi penyebab masih terjadi kemiskinan di Aceh.

Sejarah Aceh sudah mencatat adanya konflik yang sangat panjang sehingga menimbulkan banyak kerugian nyawa dan harta benda masyarakat dalam jangka panjang. Kondisi ini menimbulkan penurunan kemampuan anggaran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, peningkatan kesempatan kerja, dan penurunan kemiskinan. Setelah konflik yang sangat lama dan berpengaruh negatif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat diperparah lagi dengan adanya gempa bumi dan tsunami pada tahun 2004. Bencana ini mempunyai daya rusak yang sangat besar sehingga berpengaruh sangat besar terhadap hasil pembangunan selama ini dan memperparah pembangunan dan kemiskinan di Aceh.

Setelah rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Aceh mendapat kucuran dana yang sangat besar namun belum memberikan pengaruh signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya masalah tata kelola pemerintahan. Alokasi anggaran belum efektif dan belum mencapai sasaran penerima manfaat. Selain itu, sifat antipati masyarakat terhadap program dan kegiatan pemerintah. Ada sifat skeptis masyarakat dan menganggap bahwa program dan kegiatan masyarakat hanya bersifat seadanya dan hanya memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan. Kondisi ini, mempunyai dampak negatif ganda terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan lain, masih adanya kekurangan infrastruktur dasar dan infrastruktur bisnis. Sebagian infrastruktur dasar mungkin sudah ada, tetapi masih belum memadai. Selain itu, infrastruktur bisnis yang masih sangat kekurangan. Selanjutnya, peranan perbankan juga mengalami penurunan karena adanya pembatasan bank yang beroperasi di Aceh harus berbasis bank Syariah. Akibatnya, fungsi perbankan sangat terbatas dan ini mempunyai efek negatif terhadap kegiatan bisnis.

Korupsi masih menjadi persoalan dalam alokasi anggaran pembangunan di Aceh. Laporan Transparency International (2020), korupsi di Aceh memperlemah upaya pembangunan dan menghambat alokasi sumberdaya yang lebih efektif. Hal ini terjadi karena adanya penyalahgunaan alokasi anggaran pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan. Kondisi ini akan menimbulkan antipati masyarakat dan dunia usaha terhadap pembangunan ekonomi Aceh.

Selain itu, birokrasi yang tidak efisien akan memperburuk keadaan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengambilan keputusan yang lambat, koordinasi antarlembaga pemerintah dan mekanisme pemantauan yang tidak memadai sehingga menghambat implementasi pelaksanaan pembangunan. Hal ini terbukti dari pengesahan anggaran yang selalu terlambat.

Ada persoalan lain, perekonomian Aceh masih sangat tergantung pada sumber daya alam. Kontribusi sektor pertanian dan pertambangan masih sangat dominan pada perekonomian Aceh. Kondisi ini menghasilkan nilai tambah yang sangat sedikit. Akibatnya, penciptaan lapangan kerja sangat terbatas dan pengangguran tetap tinggi. Investasi sektor swasta sangat kecil meskipun daerah ini memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar. Investasi yang kecil tidak hanya berpengaruh terhadap keterbatasan pengolahan potensi sumberdaya alam tetapi juga akan berpengaruh terhadap keliat perekonomian secara keseluruhan.

Sektor primer yang kurang berkembang karena investasi yang kurang, infrastuktur dasar dan infrastruktur bisnis yang terbatas, dan strategi pemasaran yang belum memadai. Kondisi ini berpengaruh negatif terhadap diversifikasi sumber pertumbuhan

ekonomi daerah. Sektor pariwisata juga belum berkembang dengan baik meskipun potensi parawisata sangat besar. Kondisi infrastruktur pendukung pariwisata masih sangat terbatas dan ada beberapa potensi wisata yang belum optimal dikembangkan.

Kualitas pendidikan yang masih di bawah rata-rata nasional menjadi persoalan lain terhadap pembangunan ekonomi Aceh. Masih banyak sekolah yang memiliki keterbatasan fasilitas dasar dan kekurangan guru terlatih. Distribusi guru berkualitas masih terbatas di pusat ibukota dan sebagian daerah terpencil mengalami kekurangan guru. Kondisi ini memperburuk daya saing daerah dan ketidaksiapan tenaga kerja terhadap peluang pekerjaan di level nasional dan internasional. Akibatnya, Aceh menghadapi persaingan dari provinsi lainnya di Indonesia dalam upaya menarik investasi.

Persoalan yang tidak kalah penting adalah ancaman bencana alam dan perubahan iklim ekstrim. Dampak bencana alam ini sangat signifikan bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ancaman lainnya adalah kerusakan lingkungan termasuk kerusakan hutan dan polusi sehingga berdampak negatif pada taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Rekomendasi Penurunan Kemiskinan

Anggaran pemerintah yang sangat besar belum tentu memberikan pengaruh positif signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa pembenahan yang perlu dilakukan agar perekonomian Aceh mengalami perubahan dan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pertama, alokasi anggaran. Anggaran pemerintah harus efektif, efisien, tepat sasaran, dan mempunyai pengaruh terbesar terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan anggaran harus tepat waktu karena perekonomian Aceh sangat berpengaruh terhadap anggaran pemerintah. Keterlambatan pengesahan dan alokasi anggaran pemerintah akan memperlambat efek terhadap keberhasilan anggaran. Alokasi anggaran harus bersifat holistik dan komprehensif, kalau memang membutuhkan dukungan lintas sektor maka perlu adanya gabungan anggaran dari semua pihak terkait. Hal ini sangat penting karena anggaran harus

memberikan manfaat terbesar terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, peningkatan infrastruktur dasar dan bisnis. Daya tarik investasi tidak hanya ketersediaan sumberdaya alam yang melimpah tetapi keberadaan infrastruktur dasar dan bisnis sangat penting dan mempunyai peranan krusial untuk mencapai pembangunan ekonomi yang lebih optimal. Pihak investor akan sangat berminat jika infrastruktur dasar dan bisnis tersedia memadai dan memenuhi keperluan investor sehingga tercipta efisiensi. Efisiensi ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional dan internasional. Hal ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dari kegiatan investasi dan adanya diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi Aceh.

Ketiga, hilirisasi dan diversifikasi perekonomian. Perekonomian Aceh yang masih bersumber dari sektor pertanian dan pertambangan. Kondisi ini berakibat pada rendahnya penciptaan nilai tambah. Hilirasi sektor pertanian sehingga peran sektor industri pengolahan meningkat. Sumber perekonomian menjadi lebih bervariasi sehingga diversifikasi perekonomian bisa dicapai. Perlu dilakukan reformasi dan penyederhanaan perizinan yang menjadi kewenangan provinsi, kabupaten dan kota sehingga minat investor meningkat. Tercipta nilai tambah sektor primer dan peran sektor sekunder dan sektor tersier menjadi lebih besar. Ini akan berdampak besar bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Keempat, penghapusan korupsi. Korupsi menjadi musuh dan penghambat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Banyak bukti empiris memperlihatkan korupsi menjadi sumber terburuk bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Banyak hak masyarakat dirampas koruptor. Ketimpangan pembangunan meningkatkan kemiskinan semakin besar. Penghapusan korupsi harus dilakukan secara ekstrim melalui undang-undang pembuktian terbalik, pemiskinan koruptor, dan hukuman mati bagi koruptor sehingga menimbulkan efek jera.

Kelima, peningkatan kualitas pendidikan. Banyak negara yang tidak memiliki sumberdaya alam tetapi mencapai pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang sangat besar karena kualitas pendidikan negara tersebut sangat baik. Perbaikan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas

peserta didik dan tenaga pendidik. Perlu dilakukan upaya terstruktur dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya berpengaruh terhadap daya saing, sekaligus mempunyai peluang untuk meningkatkan nilai tambah sektor primer, dan peningkatan sektor sekunder dan tersier. Pendidikan merupakan kunci penting untuk mencapai pembangunan yang lebih signifikan.

Terakhir, adaptasi dan mitigasi bencana. Aceh yang mempunyai risiko bencana tinggi karena ada patahan gempa darat dan ring of fire di laut maka kemungkinan bencana alam gempa sangat besar. Perlu upaya mitigasi bencana dan adaptasi terhadap kondisi bencana. Kualitas pembangunan infrastruktur harus disesuaikan dengan kondisi ini sehingga risiko bencana dapat diminimalisir.

Perubahan iklim ekstrim menjadi ancaman proses produksi sektor primer. Frekuensi bencana alam yang semakin meningkat dan tekanan terhadap proses produksi sektor pertanian dan sektor lainnya maka perlu diupayakan rekayasa teknologi sehingga proses adaptasi terhadap kondisi lingkungan yang semakin dinamis. Proses adaptasi dan mitigasi ini sangat penting agar mampu mencapai produksi yang optimal.

Pembangunan akan mencapai hasil yang lebih optimal jika semua pihak melaksanakan peran masing-masing. Pemerintah harus mampu mengalokasikan anggaran secara efisien, efektif, tepat sasaran dalam mendorong perubahan struktur ekonomi, meningkatkan lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan investasi swasta. Pemerintah harus mampu meningkatkan infrastruktur dasar dan bisnis untuk menarik minat investor untuk melakukan investasi. Pemerintah harus menyederhanakan, mempermudah, dan menjamin efisiensi proses perizinan. Promosi potensi daerah harus ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan investasi sektor swasta sehingga peran sektor industri pengolahan dalam perekonomian meningkat. Peningkatan sektor swasta sangat penting karena peningkatan peran sektor industri ini akan meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian, kesempatan kerja meningkat dan kesejahteraan masyarakat lebih baik. Selanjutnya, masyarakat harus lebih terbuka terhadap proses pembangunan sehingga alokasi dana pemerintah terhadap pembangunan ekonomi masyarakat mendapatkan respons positif sehingga alokasi anggaran lebih efektif, efisien, dan berdaya ungkit signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Oleh **Dr. Anton S.Y. Kerihi** (Ketua ISEI Kupang)
Ana Maria Prisila Seran (Pengurus ISEI Kupang)
 & **Hanny Bengu, S.E., M.M.** (Sekretaris ISEI Kupang)

Kemiskinan di Indonesia bersifat multidimensional. Provinsi NTT menempati peringkat ketiga sebagai provinsi termiskin di Indonesia dengan persentase sebesar 19,96% pada tahun 2023. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program bantuan perlindungan sosial, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa untuk penduduk miskin, Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Jaminan Persalinan (Jampersal), dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan penduduk miskin, terutama yang mengalami kemiskinan kronis.

Tabel 1
Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2018-2022

Jenis Pendapatan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Pendapatan Asli Daerah	1,095,269,979	1,258,958,953	1,588,859,230	1,238,032,648,888	1,923,953,268,565
Pajak Daerah	866,157,780	908,207,118	1,088,050,232	925,862,559,388	1,486,181,102,244
Retribusi Daerah	27,570,245	60,831,986	170,108,379	69,890,857,732	184,327,767,233
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan	72,415,456	70,662,452	141,550,000	64,982,172,050	43,083,127,863
Lain-lain PAD yang sah	129,126,498	219,257,397	189,150,619	177,297,059,718	210,361,271,225

Sumber: Data Diolah, 2024

Pendapatan asli daerah Provinsi NTT meningkat cukup banyak yang didukung dari berbagai sumber penerimaan seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan PAD yang sah lain-lain. PAD Provinsi NTT mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2022. Kenaikan PAD seharusnya dapat membuat pemerintah memiliki lebih banyak sumber daya keuangan yang dapat dialokasikan untuk program-program penganggulangan kemiskinan.

Dari aspek Pemerataan akses pendidikan di NTT belum sepenuhnya dapat tercapai. Tingkat partisipasi prasekolah yang masih jauh di bawah target yang ditetapkan pemerintah. Tingkat partisipasi pendidikan tinggi juga masih tergolong rendah. Pemerintah memang telah berupaya melakukan penambahan jumlah fasilitas pendidikan, peningkatan mutu, dan peningkatan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat adapun dari tahun ke tahun. Angka putus sekolah terus mengalami penurunan. Tren 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa angka putus sekolah di semua jenjang pendidikan

mengalami penurunan lebih dari 50 persen. Hal ini mungkin bisa dipengaruhi oleh adanya PIP yang disalurkan ke masyarakat NTT dalam membantu pembiayaan sekolah. Hasil Susenas Maret 2022 menunjukkan bahwa 15.3 persen anak NTT yang sedang bersekolah di jenjang SD/ sederajat menerima PIP, 1 dari 5 siswa SMP/ sederajat menerima PIP, dan 16 dari 100 siswa SMA/ sederajat mendapat PIP (Badan Pusat Statistika NTT, 2023).

Tingkat pengangguran terbuka (TPT), rasio antara jumlah penganggur terbuka terhadap angkatan kerja, memberikan indikasi tentang besarnya tingkat pengangguran dari suatu angkatan kerja. Di lihat dari jenis kelamin, TPT perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Provinsi NTT pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 berturut turut sebesar 2.98%, 3.10%, 2.80%, 3.38%, 3.30% dan 2.85 menunjukkan bahwa setiap tahun mengalami fluktuasi TPT yang cukup signifikan. TPT Provinsi NTT pada Agustus tercatat sebesar 3,14% menurun dibandingkan Agustus 2023 sebesar 3,54% sejalan dengan dampak dari pemulihan ekonomi. Secara spasial, jika dilihat dari tingkat TPT oleh Kabupaten/Kota di Provinsi NTT maka Kota Kupang memiliki TPT tertinggi sebesar 8,55%. Hal tersebut sejalan dengan persebaran penduduk di Provinsi NTT yang terkonsentrasi di Kota Kupang sebagai ibukota Provinsi NTT. Tingkat TPT tertinggi kedua terdapat di Kabupaten Belu yakni sebesar 6,00%, sementara itu, tingkat TPT terendah terdapat di Kabupaten Sumba Tengah sebesar 1,21% (Bank Indonesia, 2024).

Pada dasarnya tingkat PAD yang tinggi dapat memberikan pemerintah daerah sumber daya yang cukup untuk mengurangi kemiskinan. Pendapatan yang cukup memungkinkan pemerintah daerah untuk membiayai program-program bantuan sosial, pelatihan keterampilan, pendidikan, perumahan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar yang dapat membantu keterampilan, pendidikan, perumahan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar yang dapat membantu masyarakat yang berada dalam kondisi

kemiskinan. PAD yang memadai, pemerintah daerah juga dapat mengalokasikan dana untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan peluang bagi masyarakat untuk keluar dari kemiskinan. Tingkat pendidikan yang rendah dapat menjadi kendala bagi individu atau keluarga dalam mengakses kesempatan pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan yang lebih tinggi. Investasi dalam pendidikan, termasuk akses yang lebih baik ke pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, dapat memberikan individu dan masyarakat kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan keterampilan, memperoleh pekerjaan yang lebih baik, dan meningkatkan pendapatan, sehingga mengurangi tingkat kemiskinan. Pengangguran yang tinggi dapat menjadi faktor penyebab kemiskinan. Pengurangan tingkat pengangguran dapat melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak dan kebijakan-kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dari pemerintah dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan.

Hasil studi penulis menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Tinggi rendahnya penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah tidak mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata juga menjadi salah satu penyebabnya, dimana ada beberapa Kab/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang difokuskan pada sektor pariwisata dan lainnya sektor pertanian, hal ini akan membuat terjadinya perbedaan pertumbuhan ekonomi sehingga pendapatan yang dihasilkan tidak menyebar secara merata di masyarakat dan tingkat kemiskinan tetap tinggi di beberapa wilayah.

Sementara tingkat pengangguran di NTT tidak berpengaruh terhadap kemiskinan dikarenakan struktur ekonomi di Provinsi NTT didominasi oleh sektor informal atau subsisten, dimana pendapatan tidak tergantung sepenuhnya pada pekerjaan informal. Orang yang menganggur tidak selamanya miskin, selama dia masih mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dan juga semakin bertambahnya pengangguran terdidik, mereka masih bisa dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan baik dikarenakan biaya hidup masih tergantung kepada orangtua ataupun keluarganya.

Pendidikan yang difokuskan pada angka partisipasi murni tidak mempengaruhi kemiskinan karena angka partisipasi murni hanya memberikan informasi mengenai partisipasi individu dalam pendidikan. penyebab tidak berpengaruhnya tingkat pendidikan yaitu dikarenakan kualitas pendidikan pada Provinsi NTT masih tergolong rendah dibandingkan Provinsi-Provinsi lainnya di Indonesia. Pada dasarnya, tingkat pendidikan yang tinggi tidak selalu menjamin keterampilan dan pengetahuan yang relevan. Data BPS tahun 2021 menunjukkan sebesar 51,14 persen tenaga kerja NTT lulusan SD ke bawah. Hal ini menunjukkan bahwa pasar kerja di Provinsi NTT terbatas dan tidak mampu menyerap lulusan pendidikan tinggi sehingga tingkat pendidikan tidak akan berdampak signifikan pada tingkat kemiskinan.

Potensi sumber daya yang melimpah oleh Provinsi NTT seharusnya dikelola dengan baik, namun kurangnya pengelolaan yang baik dan kurangnya investasi dalam pengembangan sektor ini dapat menghambat potensi ekonomi dan menciptakan ketimpangan pendapatan. Kurangnya perhatian terhadap pengelolaan sumber daya dapat menghambat upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengurangi kemiskinan. Keterbatasan akses pendidikan dan kualitas pendidikan yang rendah di NTT dapat menghambat kesempatan kerja yang berkualitas. Kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas, terutama di daerah terpencil, dapat membatasi kemampuan individu untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan. Penting untuk memastikan distribusi yang adil dan berkelanjutan dari manfaat pengelolaan sumber daya, serta mengurangi kesenjangan regional, sehingga pendapatan asli daerah dan peluang kerja dapat berdampak positif pada tingkat kemiskinan. Oleh karena itu pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan untuk menanggulangi masalah kemiskinan, mulai dari akar permasalahan kemiskinan untuk mengatasi ketimpangan pendapatan seperti menangani masalah pengangguran, pendidikan dan faktor-faktor lainnya dengan cara memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan fasilitas pendidikan dan pemerataan akses pendidikan.

Menerawang Dimensi Etis Kebijakan Ekonomi Pemerintah Baru

Oleh **Dr. Junanto Herdiawan, S.E., M.A.**

Anggota Bidang I Pengurus Pusat ISEI
& Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung

Bangsa Indonesia akan memiliki pemerintahan baru di penghujung tahun 2024. Sebagaimana pemerintahan baru, berbagai pihak tentu menyoroti arah kebijakan yang akan ditempuh dalam lima tahun ke depan, termasuk kebijakan ekonomi yang berdampak pada kehidupan sehari-hari. Ekonomi Indonesia tahun 2024 diprediksi masih akan tumbuh positif di tengah berbagai tekanan global. Meski demikian, cita-cita menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan kecepatan pertumbuhan yang lebih tinggi dari yang ada saat ini. Salah satu janji pasangan Prabowo-Gibran yang menarik perhatian banyak pihak adalah keinginan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 6-7 persen, di atas tren pertumbuhan satu dekade terakhir di kisaran 5 persen. Saat berpidato di Mandiri Investment Forum Jakarta, 5 Maret 2024, Prabowo bahkan optimis kalau ekonomi Indonesia masih bisa didorong untuk tumbuh hingga 8 persen dalam 4-5 tahun ke depan.

Selain pertumbuhan, ada janji-janji lain yang menarik juga untuk dicermati, seperti program makan siang bergizi bagi anak sekolah, anak balita, dan ibu hamil. Berbagai analisis dan spekulasi pun muncul mempertanyakan bagaimana strategi pemerintahan baru nanti untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membiayai kebijakan-kebijakan ekspansif tersebut.

Di satu sisi, program kebijakan pemerintah baru tersebut menyimpan harapan besar untuk lebih baiknya ekonomi Indonesia ke depan. Apabila dijalankan dengan baik dan konsisten tentunya kita berharap Indonesia Emas 2045 akan terwujud. Pertanyaan selanjutnya yang perlu juga menjadi renungan kita adalah bagaimana agar pembangunan ekonomi di Indonesia juga memiliki kualitas etis yang tepat sehingga dalam perjalanannya tetap menjaga keadilan bagi masyarakat.

Aspek Etis Ekonomi

Hampir menjadi keyakinan banyak orang, bahkan di kalangan ekonom sendiri, bahwa urusan ekonomi itu berada dalam sebuah kompartemen terpisah. Ekonom lebih banyak berkutat dengan pentingnya angka-angka pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan

sejenisnya. Ketika terjadi masalah seperti krisis kesehatan atau lingkungan, muncul anggapan bahwa hal itu berada di luar bangunan ekonomi, yang tanggung jawabnya bukan lagi diserahkan pada ekonom. Beberapa ekonom bahkan menyebutnya sebagai faktor eksternalitas. Penyelesaiannya diserahkan pada ahli-ahli ilmu lainnya, seperti sosiolog atau teknolog misalnya. Padahal aspek lingkungan, kesehatan, bahkan budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan ekonomi.

Dalam bukunya *The Great Transformation* (1944), Karl Polanyi mengangkat gagasan tentang ketertanaman ekonomi (*embedded economy*) yang tidak memisahkan ekonomi dari kehidupan sosial dan politik. Berkembangnya kapitalisme telah mendorong ekonomi untuk hanya fokus pada angka-angka pertumbuhan atau keuntungan bagi pemilik modal, sehingga kemudian terpisah dengan kehidupan masyarakat di lapis bawah, bahkan terhadap lingkungan. Menurut Polanyi, ekonomi itu tertanam secara organik dalam masyarakat dan alam. Upaya memisahkan ekonomi sebagai sistem yang terpisah dengan hukumnya sendiri telah memutuskan kaitan organik dan mensubordinatkan masyarakat dan alam ke dalam ekonomi. Tidak pernah dalam sejarah suatu sistem sosial terpisah atau menjadi subordinat ekonomi. Ekonomi manusia selalu tertanam dalam masyarakat dan alam. Ketertanaman berarti bahwa ekonomi tidak pernah otonom, malahan cenderung sebagai subordinat dari politik dan masalah sosial lainnya.

David Harvey, seorang ekonom dan ilmuwan geografi, berpandangan seperti Polanyi. Menurutnya, pembangunan yang digerakkan oleh kinerja kapitalisme, telah membawa aksi pelakunya untuk berlari cepat mengejar keuntungan dan pertumbuhan yang berlipat ganda. Berkembangnya teknologi internet dan transportasi telah semakin mempercepat gerak arus modal ke berbagai penjuru dunia. Akibatnya, dimensi etis kerap terpinggirkan dalam derap langkah arus modal, bahkan dipisahkan keluar dari bangunan ekonomi.

Dimensi Etis Kebijakan Ekonomi Pemerintah Baru

Janji pemerintah baru untuk mendorong pertumbuhan tentunya sangatlah baik, tetapi perlu tetap diingat untuk selalu menanamkan dimensi etis dalam pembangunan ekonomi. Apa yang etis dalam kebijakan ekonomi suatu negara?

Dalam bukunya yang terbaru, *The Road to Freedom: Economics and The Good Society*, Joseph Stiglitz memperkenalkan istilah “kapitalisme progresif”. Sebagai ekonom Keynesian, Stiglitz dikenal keras terhadap kapitalisme dan liberalisme yang dianggapnya lebih menguntungkan para pemilik modal. Tetapi pada praktiknya, hingga saat ini, belum ada yang dapat menggantikan kapitalisme sepenuhnya sebagai sistem ekonomi yang diterapkan di banyak negara. Dalam buku barunya tersebut, Stiglitz menyodorkan jalan baru untuk keluar dari jeratan sistem kapitalisme yang tidak berdimensi etis. Ia menyebutnya “kapitalisme progresif”.

Pada dasarnya, Stiglitz masih percaya bahwa kebebasan berusaha adalah fondasi utama dalam menopang sistem politik dan ekonomi yang adil. Namun kebebasan yang dimaksud bukanlah kebebasan kapitalisme model Friedrich Hayek dan Milton Friedman yang berujung pada meningkatkan kesenjangan dan ketidakadilan. Ketika peran negara minimal, kita terjebak dalam situasi pertarungan bebas berebut kue ekonomi. Maka yang kaya akan semakin kaya, sementara yang miskin akan semakin menderita dalam kemiskinannya. Jalan Stiglitz adalah jalan tengah antara sosialisme yang mengutamakan peran negara dan kapitalisme yang mengutamakan peran pasar. Dalam hal ini, kita melihat Indonesia sudah berada di jalur yang tepat karena peran negara dalam berbagai hal yang menyangkut hajat hidup masyarakat sudah cukup besar.

Kebijakan ekonomi perlu menyeimbangkan kepentingan dari kelompok masyarakat yang kaya, menengah, pengusaha, pekerja, hingga masyarakat miskin. Upaya melindungi masyarakat yang berada di kelompok kurang beruntung perlu menjadi prioritas karena pemulihan ekonomi menyangkut pada urusan hidup mati mereka. Dengan demikian, dalam kondisi pasar bebas, peran pemerintah dengan daya regulasinya adalah pilihan etis yang dibutuhkan untuk melindungi masyarakat yang tidak beruntung. Kita tidak bisa menyerahkan nasib pada kekuatan pasar

semata. Sungai sejarah ekonomi, sebagaimana dapat dilihat juga pada *Capital and Ideology* karya Thomas Piketty, selalu berayun di antara dua pendulum, yaitu kebebasan berusaha pasar dan daya regulasi pemerintah. Ketika ekonomi didominasi oleh kebebasan berusaha pasar yang berlebihan atau bahkan sebaliknya, didominasi oleh daya regulasi pemerintah yang mencengkeram, maka tatanan masyarakat akan diwarnai oleh dehumanisasi. Jadi, paham neoliberalisme yang memberikan ruang kebebasan berusaha berlebihan pada pasar, sama berbahayanya dengan paham otoritarianisme, fasisme, komunisme, dan ultra kanan yang memberikan ruang cengkeraman regulasi pemerintah yang berlebihan.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah baru perlu terus menjaga dan mencari titik optimum untuk menyeimbangkan elemen ‘kebebasan berusaha’ dan ‘daya regulasinya’. Langkah pemerintah kita untuk turun tangan dalam berbagai kebijakan yang menyangkut hajat hidup masyarakat Indonesia dinilai sudah tepat. Namun pemerintah juga jangan sampai terjebak pada dorongan untuk menjadikan daya regulasi di setiap dimensi ekonomi, atau mengatur kehidupan secara berlebihan sehingga pasar kehilangan perannya. Tingkat kebebasan berusaha juga harus dijaga dengan tetap memberi ruang pada beberapa sektor yang dapat menjadi motor penggerak perekonomian. Dan tentunya, dalam situasi tertentu, dunia usaha juga membutuhkan peran pemerintah untuk turun tangan mengurangi ketidakpastian.

Pada akhirnya, kualitas aparat pemerintah yang memiliki integritas, profesionalisme, kepemimpinan, dan mampu menanamkan etika dalam kebijakan publik, menjadi hal penting untuk melindungi masyarakat. Pemerintah dan para pengambil kebijakan juga perlu didukung oleh komunitas, kelompok masyarakat, yang memiliki kepedulian untuk menjadikan etika tertanam kembali dalam ekonomi sehingga dapat menjaga titik optimum kebijakan dalam menangani krisis saat ini.



PROUD
BEYOND CREDENTIALS
PENGAKSIAN AKUNTANSI

INDONESIA
Maju

S2 MAGISTER AKUNTANSI PROGRAM LEADERS' CLASS



Kurikulum

Menggunakan kurikulum berbasis Chartered Accountant (CA)
Perkuliahan melibatkan praktisi dan profesional

Sistem Perkuliahan

Sistem perkuliahan dilakukan secara hybrid

Syarat Penerimaan Mahasiswa Baru

Penerimaan mahasiswa baru diadakan setiap bulan **September** dengan ketentuan:

- Lulusan S1 Akuntansi telah bekerja minimal 2 tahun
- Lulusan S1 Non Akuntansi telah bekerja minimal 2 tahun di bidang akuntansi

FOR MORE INFORMATION Prodi Magister Akuntansi



feb.s2.akuntansi@uksw.edu



0856 0158 8743 (Maria Thyrsa)



http://bit.ly/LeadersClass_MAK

Turnamen Golf ISEI 2024 “Sinergi Untuk Indonesia”



Kegiatan Turnamen Golf ISEI 2024 diadakan pada hari Sabtu, 22 Juni 2024 di Sedayu Indo Golf yang bertujuan untuk mendukung Kongres ISEI XXII dan SEMNAS 2024 di Surakarta. Dengan didukung oleh 18 mitra kerja ISEI yang berasal dari sektor perbankan dan 31 mitra kerja ISEI yang berasal dari sektor non-perbankan, sebanyak 133 pemain ikut meramaikan kegiatan Turnamen Golf ISEI 2024 baik berasal dari pengurus ISEI dan mitra kerja ISEI. Kegiatan yang dibuka secara langsung oleh Bapak Perry Warjiyo selaku Ketua Umum PP ISEI, Bapak Mahendra Siregar selaku Ketua Dewan Komisiner OJK RI, Bapak Jahja Setiaatmadja selaku Bendahara Umum PP ISEI, dan Bapak Antonius Widodo selaku Ketua Turnamen Golf ISEI 2024 dengan pemukulan bola asap berlangsung meriah. Pada kegiatan kali ini, Bapak Perry Warjiyo menekankan bahwa Kegiatan GOLF adalah “*Game Of Love and Fun*” yang artinya harus dijadikan ajang permainan yang dipenuhi cinta dan rasa senang untuk melepaskan rasa penat setelah padatnya rutinitas pekerjaan. Pada siang harinya, diadakan juga acara makan siang dan hiburan yang berguna untuk menghadirkan suasana kekeluargaan, pengumuman pemenang, dan pembagian doorprize.

Kegiatan Turnamen Golf ISEI 2024 kali ini juga menyerahkan donasi kepada 3 panti asuhan yakni Yayasan Pondok Pesantren Uzlifatil Jannah yang diwakili Bapak Muhammad Najib, Panti Asuhan Debora GKPA yang diwakili Bapak Pdt. Harapan Nainggolan, dan Yayasan Yatim Piatu Anatha Nusantara yang diwakili Bapak I Made Rama.

Sebagai penyelenggara Turnamen Golf ISEI 2024, kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yakni PT. Bank Central Asia Tbk selaku *Host* Turnamen Golf ISEI 2024, Mitra Kerja ISEI, Pengurus ISEI, Panitia Turnamen Golf ISEI 2024, Sedayu Indo Golf selaku penyedia *Venue* Turnamen Golf ISEI 2024, dan *Event Organizer* selaku eksekutor Turnamen Golf ISEI 2024.



Check For Detail

Editor: Firman Sihol Parningotan

Workshop Personal Branding Untuk Karier “Pelatihan CV ATS Friendly & Penggunaan LinkedIn”



Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengadakan kegiatan *Online Workshop* yang mengambil tema “*Personal Branding* untuk Karier” yang bekerja sama dengan FBE UAJY, FB UKDW, dan PPBE FBE UAJY. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 02 Juli 2024 dan dibuka oleh Prof. Christantius Dwiatmadja, M.E., Ph.D selaku Wakil Ketua Bidang III PP ISEI & Guru Besar UKSW. Dalam sesi *opening speech*, Prof. Christ menyampaikan pentingnya memberikan bekal pelatihan soft skill bagi generasi muda kedepannya sebagai bentuk *human capital investment* pada generasi-z dan milenial untuk dapat terserap ke industri kerja. ISEI sebagai organisasi profesi perlu menjadi fasilitator yang menyediakan ruang melalui *workshop* dengan topik relevan seperti ini untuk “membumikan” ISEI ke generasi muda.

Pada sesi *welcome remarks* yang disampaikan oleh Ibu Wenefrida Mahestu Noviandra Krisjanti, M.Sc., Ph.D selaku Dekan FBE UAJY juga mengingatkan tantangan perekonomian global dan potensi sulitnya generasi emas Indonesia nantinya terserap ke dalam pasar tenaga kerja atau saat ini akrab disebut sebagai klasifikasi *not employment, education, and training* (NEET).

Apabila tidak tertangani dengan baik, maka terdapat potensi adanya ketimpangan antar generasi yang dapat tercipta karena pasar tenaga kerja saat ini tidak dibekali dengan baik. Bu Andra juga mengatakan “raihlah hari ini, belajarliah banyak banyak” yang menggelorakan peserta *workshop* untuk dapat sesuai dengan semangat UAJY yakni “*serviens in lumine veritatis*” atau dalam bahasa indonesia artinya menerangi dalam cahaya kebenaran.

Sesi pertama workshop disampaikan oleh Ibu Api Adyantari, S.A., M.B.A. selaku dosen FBE UAJY dengan pemaparan materi *workshop “Curriculum Vitae kreatif dan ATS Friendly”* dimana masih banyak mispersepsi pada pengisian dan klasifikasi dalam penggunaan CV Kreatif dan ATS Friendly.

Selanjutnya, sesi kedua *workshop* disampaikan oleh Ibu Ambar Kusuma Astuti, S.E., M.Si selaku Wakil Rektor II UKDW dan dosen FB UKDW yang menyampaikan materi *workshop “organizational commitment dan digital accesibility”* dimana disampaikan pentingnya menemukan komitmen bekerja pada *fresh graduates* dan pembekalan skill digitalisasi yang menunjang dunia kerja.

Terakhir, sesi ketiga *workshop* diberikan pelatihan mengenai “Membangun *Personal Branding* Untuk LinkedIn” dimana saat ini banyak recruiters dunia kerja yang menjadikan LinkedIn sebagai *benchmark* untuk melakukan rekrutmen yang disampaikan oleh Ibu Api Adyantari, S.A., M.B.A.

Workshop yang dihadiri oleh 150 peserta ini juga diisi oleh sesi tanya jawab dari berbagai audiens dan dimoderasi oleh Bapak Vonezyo Yupanzara Dhamoresz, S.E., M.B.A. selaku dosen FBE UAJY. Kegiatan ini berlangsung sangat *insightful* dan memunculkan *interest* peserta untuk mempersiapkan V yang sesuai kebutuhan mereka dan LinkedIn sebagai cakrawala untuk melakukan *networking*.



Check For Detail

Editor: Jonathan Ersten Herawan

Soft Launching Warta ISEI Vol.1, No.1 “Orkestrasi ISEI”



Setelah vakum selama 12 tahun, dengan penuh rasa bangga Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) kembali melakukan *soft launching* untuk Warta ISEI Vol.1, No.1, Juni 2024 dengan tema “Orkestrasi ISEI”. Warta ISEI merupakan wadah untuk melakukan sinergi dan kolaborasi pusat & cabang ISEI. Soft Launching Warta ISEI kali ini diadakan di Sekretariat PP ISEI dan melalui live streaming di instagram @ppisei_official.

Warta ISEI edisi perdana telah terpublikasi dengan ISSN 3048-0574 yang diterbitkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dalam edisi perdananya, Warta ISEI telah melibatkan multi *stakeholders* (Pengurus Pusat ISEI, ISEI Cabang, dan Mitra kerja ISEI) yang merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi yang nyata antara Akademisi, Bisnis, dan Government.

Dalam acara soft launching, Bapak Yoga Affandi, Ph.D., selaku Sekretaris Umum PP ISEI menyampaikan rasa syukur menyambut edisi perdana Warta ISEI dan mendukung penuh berjalannya Warta ISEI dengan menulis artikel pada halaman pertama yang berjudul “Adopsi Digital Untuk Kemajuan UMK”. Ketua Dewan Redaksi Warta ISEI, Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec., mengucapkan rasa syukur dan sukacita atas terbitnya Warta ISEI, dan mengapresiasi semua yang terlibat dalam Warta ISEI. Sebagai bentuk kemandirian, dalam edisi perdana Warta ISEI telah mendapatkan dukungan dari mitra kerja yakni LAMEMBA, PT. ALLO BANK, Tbk., PT. Bank Jago, Tbk., dan PT. Bank Ganesha, Tbk.

Hal yang menarik pada Warta ISEI adalah topik tulisan artikel populer yang berasal dari ISEI Cabang dengan topik regional, beberapa cabang ekonomi baru, dan situasi & kondisi perekonomian nasional. Kedepannya, Warta ISEI dapat menjadi kekuatan bagi ISEI untuk

dapat berkontribusi memberikan update ilmu ekonomi, situasi perekonomian, dan hal aktual lainnya yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

Dalam acara ini diadakan juga kuliah singkat penulisan artikel opini yang disampaikan oleh Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M.Sc dan dimoderasi oleh Dr. Aviliani. Dalam pemaparan materinya, dijelaskan strategi dan tahapan untuk melakukan publikasi artikel opini dan juga selera dari beberapa koran ternama di Indonesia. Banyak peserta yang antusias mengikuti kegiatan soft launching karena dimoderasi oleh Dr. Aviliani.

Warta ISEI juga diminta dapat menjadi wadah untuk bagi ekonom muda menulis dan mengekspresikan pemikiran, ide, dan gagasan karena kedepannya mereka akan menjadi generasi emas yang akan berperan sebagai agent of change dan main agent pembangunan. Terakhir, acara ditutup dengan ramah tamah dan makan siang bergizi sebagai bentuk endogenitas bagi UMKM Karyawan Sekretariat PP ISEI.

Semangat dan sukses bagi terbitan Warta ISEI Vol.1, No.1, Juni 2024!



E-Magazine Warta ISEI

Password Hubungi: +62-882-27348958 (Jonathan)
Editor: Firman Sihol arningotan

Seminar *Series* Kajian Kebijakan Publik (KKP) 5.0 di Medan



Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) kembali menyelenggarakan kegiatan Seminar *Series* Buku Kajian Kebijakan Publik (KKP) 5.0. Rangkaian seminar ini merupakan seri ketiga yang dilaksanakan pada Senin, 22 Juli 2024 bertempat di Ruang Kuala Deli, Lantai 9 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara, Medan. Seminar *Series* ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan *Road to Kongres ISEI XXII*. Kegiatan dihadiri 175 peserta secara *offline* yang terdiri dari perwakilan akademisi (A), pelaku usaha (*Business/B*) dan Pemerintah (*Government/G*). Sebelumnya, seri pertama dan kedua telah sukses dilaksanakan masing-masing di Surabaya (28 Mei 2024) dan Makassar (25 Juni 2024). Seminar *Series* ketiga ini mengangkat tema "Implementasi Hilirisasi Pangan di Daerah". Deputy Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman Ph.D selaku Ketua Bidang II Pengurus Pusat (PP) ISEI menyampaikan *keynote speech* pada sesi pembukaan. Di samping itu, sambutan disampaikan pada sesi pembukaan oleh Wakil Ketua ISEI Cabang Medan (Coki Ahmad Syahwier). Turut hadir pada kegiatan tersebut antara lain Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara (IGP Wira Kusuma), Direktur Bank Indonesia Institute (Cicilia A. Harun), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara (Asim Saputra), Kepala

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 1 Medan (Muhammad Yusron), dan Pimpinan Wilayah BULOG (Arif Mandu).

Deputy Gubernur Bank Indonesia sekaligus Ketua Bidang II PP ISEI menyampaikan bahwa terlaksananya Seminar *Series* KKP 5.0 ini merupakan kolaborasi antara Bank Indonesia dan ISEI dalam memperkuat sinergi dan kebangkitan ekonomi melalui hilirisasi di Indonesia. Dalam pengantarnya, Deputy Gubernur Bank Indonesia memaparkan terdapat 3 (tiga) hal yang menunjukkan bahwa industri manufaktur berperan dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Maju 2045. *Pertama*, industri manufaktur menjadi salah satu pilar dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang dan berkelanjutan. *Kedua*, pengembangan industri manufaktur dilakukan secara bertahap dan terintegrasi. *Ketiga*, adanya dukungan industri *medium-technology*. Dalam upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat, berkelanjutan, seimbang dan inklusif, dibutuhkan strategi pengembangan manufaktur yang diarahkan untuk mendukung peningkatan nilai tambah dan stabilisasi harga. Strategi peningkatan nilai tambah manufaktur dapat dicapai dengan pendekatan *two-pronged approach reform strategy*, yaitu industri padat karya

dan *medium-tech*. Di sisi lain, *three-pronged approach* dibutuhkan untuk penguatan hilirisasi pangan. Tentu nya, strategi tersebut didukung oleh 3P, yaitu Perbaikan Faktor Produksi (P1), Pengaturan dan Kelembagaan (P2), dan Promosi dan Kerja Sama Perdagangan (P3).

Pembahasan terkait tema "Implementasi Hilirisasi Pangan di Daerah" ini merupakan pendalaman dari tema besar yang diangkat pada buku KKP 5.0 yang saat ini tengah disusun oleh Bidang II PP ISEI. Diskusi berjalan aktif dengan dipandu oleh moderator yaitu Donni Fajar Anugrah, Ph.D (Deputi Direktur Bank Indonesia Institute) selaku Wakil Ketua *Focus Group* Moneter dan Makroprudensial Bidang II PP ISEI. Guru Besar IPB University sekaligus anggota Bidang III PP ISEI (Prof. Muhammad Firdaus) mengungkapkan bahwa upaya hilirisasi pangan berguna untuk mencapai sasaran makroekonomi. Hal tersebut didukung dari rasional ekonomi hilirisasi pangan terhadap inflasi, ekspor, dan pengangguran. Secara teoritis, hilirisasi pangan akan meningkatkan elastisitas permintaan pangan segar dan memberikan petani alternatif penjualan saat panen raya, sehingga ketahanan pangan dapat terwujud melalui cadangan yang terjaga. Hilirisasi pangan juga turut berkontribusi positif terhadap penurunan pengangguran melalui ekspor pangan olahan yang menyerap tenaga kerja tinggi. Direktur Eksekutif Departemen Regional Bank Indonesia sekaligus Ketua *Focus Group* Ekonomi dan

Keuangan Syariah Bidang II PP ISEI (Arief Hartawan) mengungkapkan bahwa salah satu implementasi dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah adalah melalui perumusan kebijakan daerah dan pengembangan UMKM yang diarahkan pada penguatan Korporatisasi, Kapasitas, dan Pembiayaan (KKP). Wakil Dekan III Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara (Prof. Elisa Julianti) turut menyampaikan bahwa implementasi kebijakan hilirisasi pangan di Sumatera Utara tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024. Dari sisi pelaku usaha, Gapoktan Sri Karya (Parlan Sibarani) memaparkan bahwa upaya pengembangan hilirisasi beras oleh telah dilakukan dengan memastikan di sisi hulu hingga hilir. Keberhasilan Gapoktan Sri Karya salah satunya adalah dengan produk olahan beras "Sri Wangi" yang telah dijual secara umum di Kota Medan.



Check For Detail

Editor: Donni Fajar Anugrah

Diskusi Terbatas ISEI Cabang Surabaya Koordinator Jawa Timur “Masa Depan Lembaga Keuangan Mikro di Era Perbankan Digital”



Focus Group UMKM, Koperasi dan Keuangan Syariah Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Surabaya Koordinator Jawa Timur menyelenggarakan diskusi terbatas pada tanggal 24 Juli 2024 yang dihadiri oleh tiga orang narasumber, yaitu: Maulana Y (Deputi Direktur Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 4 Jawa Timur), Agung Soeprihatmanto (Direktur Pemasaran Bank UMKM Jatim), Lutfi I Hakim (Ketua PWI Jawa Timur). Diskusi ini dihadiri oleh 9 orang peserta dari pengurus ISEI Cabang Surabaya Koordinator Jawa Timur, Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 4 Jawa Timur dan Bank UMKM Jatim.

Beberapa poin penting dalam diskusi ini yang disampaikan oleh Bapak Maulana Y. (Deputi Direktur Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 4 Jawa Timur) yaitu:

Fakta bahwa saat ini banyak BPR di Jawa Timur yang ditutup dan dicabut ijin usahanya. Penutupan BPR ini sebenarnya bukan disebabkan oleh persaingan, tetapi lebih disebabkan oleh buruknya tata kelola yang diakibatkan oleh ketarnya persaingan sehingga banyak BPR yang melakukan rekayasa pada laporan keuangan. Sehingga permasalahan menjadi semakin parah, dan terpaksa BPR tersebut harus ditutup.

2) Terkait dengan adanya digitalisasi, fakta menunjukkan bahwa digitalisasi dalam berbagai bidang termasuk industri jasa keuangan dan perbankan tidak mungkin untuk dibendung. Oleh karena itu, BPR dan Lembaga keuangan mikro (LKM) tidak

mungkin untuk menghindari penggunaan teknologi digital untuk operasi bisnis. Kita juga sama-sama menyaksikan bahwa digitalisasi selain memberikan dampak positif terhadap industri jasa keuangan, tetapi juga memberikan efek negatif, seperti terjadinya kecurangan keuangan (fraud), yang sangat merugikan kepentingan masyarakat sebagai pengguna industri jasa keuangan. Beliau menyampaikan bahwa OJK memberikan dorongan penerapan digitalisasi pada LKM. Penerapan digitalisasi di lembaga keuangan mikro (LKM) harus didukung oleh kompetensi yang dimiliki oleh SDM yang ada di LKM dan besarnya dana yang dibutuhkan.

Bapak Agung Soeprihatmanto (Direktur Pemasaran Bank UMKM) menyatakan bahwa terjadi persaingan antara BPR dan bank umum dalam penyaluran kredit ke nasabah terutama ke UMKM. Baik BPR maupun bank umum boleh menyalurkan kredit ke UMKM. Dalam banyak kasus, terdapat UMKM yang semula menjadi nasabah BPR dan memperoleh kredit dari BPR dengan plafon tertentu. Ketika kemudian UMKM tersebut naik kelas (usahanya makin berkembang dan membutuhkan kredit dengan plafon yang lebih besar), maka UMKM tersebut kemudian beralih ke bank umum (Kredit Usaha Rakyat/KUR bank umum) agar dapat memperoleh kredit dengan plafon yang lebih besar. Hal inilah yang menimbulkan persaingan yang tidak fair antara bank umum dan BPR. Hal ini salah satunya terjadi antara Bank UMKM Jatim sebagai BPR dan Bank Jatim sebagai bank umum. Bahkan persaingan

tidak hanya terjadi antara sebuah BPR dengan BPR lainnya, tetapi juga terjadi persaingan diantara kantor cabang di sebuah BPR. Misalnya, seorang kepala kantor cabang BPR tertentu pindah tugas ke kantor cabang yang lain di BPR yang sama. Hal ini bisa diikuti oleh perpindahan seorang nasabah dari kantor cabang semula ke kantor cabang baru tempat kepala kantor cabang tersebut bertugas.

Bapak Lutfi I Hakim (Ketua PWI Jawa Timur) mengatakan bahwa kita harus melihat BPR dan LKM itu sebagai sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam konteks kinerja ekonomi nasional. Artinya bahwa upaya untuk meningkatkan kinerja ekonomi nasional perlu dukungan dari lembaga keuangan dan perbankan. Oleh karena itu, ekonomi nasional akan kuat jika para pelaku ekonomi memperoleh dukungan dari lembaga perbankan yang sehat dan profesional, baik bank umum, BPR dan LKM. Oleh karena itu, harus ada upaya agar masing-masing lembaga perbankan tersebut dapat menjalankan fungsinya dengan baik sebagai lembaga intermediasi

yang harus dapat menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kredit/pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Adanya persaingan yang tidak sehat antara bank umum dan BPR, serta antara BPR dan LKM seharusnya perlu dihindari. Oleh karena itu, perlu dilakukan segmentasi lembaga perbankan. Sebuah peraturan yang mengatur segmen mana saja yang boleh dimasuki oleh masing-masing jenis bank baik bank umum, BPR, dan LKM. Aturan semacam ini perlu dibuat agar supaya persaingan yang terjadi diantara mereka tidak menjadi saling mematikan, terutama bank yang ukurannya lebih besar mematikan bank lain yang ukurannya lebih kecil. Melalui segmentasi/klasterisasi, maka diharapkan semua lembaga perbankan tersebut dapat berperan secara optimal dalam menopang perkembangan bisnis dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi. (Budiono).

Editor: Firman Sihol Parningotan

Seminar Nasional *Eventonomics: Learning From Swiftonomics, Multisport Events, and MICE*



Universitas Bangka Belitung (UBB) berkolaborasi dengan Pengurus Pusat ISEI dan BAPPENAS menyelenggarakan Seminar Nasional dengan mengusung tema: “*Eventonomics: Learning from Swiftonomics, Multisport Event, and MICE*”. Seminar Nasional di selenggarakan secara hybrid dari Balai Peradaban Universitas Bangka Belitung pada tanggal 26 Juli 2024.

Dengan pesona kota beribu senyumannya, Kota Pangkalpinang diharapkan dapat menjadi pusat berbagai perhelatan Internasional yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Seminar Nasional dibuka oleh Rektor Universitas Bangka Belitung, Prof. Dr. Ibrahim, S.Fil., M.Si. Bapak Rektor menekankan pentingnya pergeseran paradigma pembangunan dan mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru dari sektor ekstraktif menjadi sektor jasa yang salah satunya *Business Event*. Selanjutnya, dalam pembukaannya Ibu Dr. Arlyana Abubakar selaku Sekretaris IV Pengurus Pusat ISEI menyatakan pentingnya mendorong *business event* dalam kerangka *urban tourism* untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Keynote speaker, Prof. Dr. Bambang PS Brodjonegoro, menyampaikan paparan antara lain berdasarkan hasil kajian: “Economic Impact of the 2018 Asian Games in Indonesia dalam buku *“The Indonesian Economy and the Surrounding Regions in the 21st Century*. Bahwa dampak ekonomi

business events, mulai dari *Pre-Event* (meliputi belanja persiapan infrastruktur), saat *Event* (meliputi pengeluaran peserta, pengunjung, dan hak siar), dan *Pasca Event* (meliputi belanja *online*, kunjungan ulang, citra daerah, dan investasi). Besarnya total pengeluaran langsung untuk perencanaan dan produksi *business event*, perjalanan terkait acara, pengeluaran peserta pameran senilai US\$1,2 triliun dengan menghadirkan 10,9 juta pekerja langsung.

Terdapat beberapa catatan yang diberikan Prof. Dr. Bambang PS Brodjonegoro agar dampak ekonomi dari *business event* dapat berjalan maksimal dan berkelanjutan yakni memberikan kemudahan dan kepastian jadwal *event*, memberikan sosialisasi dan promosi yang baik, mendorong partisipasi warga lokal dengan peningkatan modal sosial, penyediaan *hard and soft infrastructure*, dan kemudahan perijinan *event* dan infrastruktur *event* yang menunjang kegiatan.

Dalam *plenary session* dimoderasi oleh Ketua ISEI Cabang Bangka Belitung dan Ketua Program Studi MM UBB, Ibu Dr. Reniati, S.E., M.Si. Pembicara pertama, Ibu Amalia Adininggar Widyasanti, Ph.D., selaku Pengurus Pusat ISEI Bidang I, Deputy Bidang Ekonomi Kementerian PPN/BAPPENAS RI, dan Plt. Kepala BPS RI menyebutkan bahwa Asian Games 2018 meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,05 persen, *Annual Meeting IMF-WB Group* 2018 meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,01

persen dan rangkaian Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 berkontribusi sebesar 7,6 triliun rupiah. Ketiga *event* internasional tersebut terbukti memberikan *multiplier effect* pada perekonomian domestik pada lapangan usaha meliputi konstruksi, pariwisata & perhotelan, makanan & minuman, rekreasi & hiburan, penyiaran, dan transportasi.

Pada aspek pengeluaran, berbagai *event* tersebut terbukti telah meningkatkan pengeluaran di sektor belanja pemerintah, investasi infrastruktur, pengeluaran delegasi, pengeluaran swasta, dan pengeluaran pengunjung yang telah membuat berbagai *success story* Indonesia dalam perhelatan *event* internasional. Menurut hasil survey OCA & Federasi Olahraga Internasional menyatakan bahwa 85 persen menyatakan Asian Games merubah pandangan Indonesia secara positif dan sebesar 97 persen akan merekomendasikan serta mendukung Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan *event* internasional.

Pemaparan kedua dilakukan oleh Bapak Mohammad Dian Revindo, Ph.D. selaku Pengurus Pusat ISEI Bidang III & Dosen dan Peneliti Universitas Indonesia. Disampaikan bahwa peluncuran digital layanan perizinan penyelenggaraan *event* menjadi angin segar bagi industri kreatif tanah air karena mencakup perijinan acara, imigrasi, bea cukai, hingga perizinan kepolisian yang akan mempermudah berebut bintang dunia yang berdampak bagi perekonomian nasional. Pada saat pelaksanaan konser musik Coldplay diperoleh hasil bahwa pemerataan dampak *output* terjadi pada *event* konser Coldplay di Singapura sedangkan di Indonesia dominan kuat di jasa kesenian hiburan dan rekreasi.

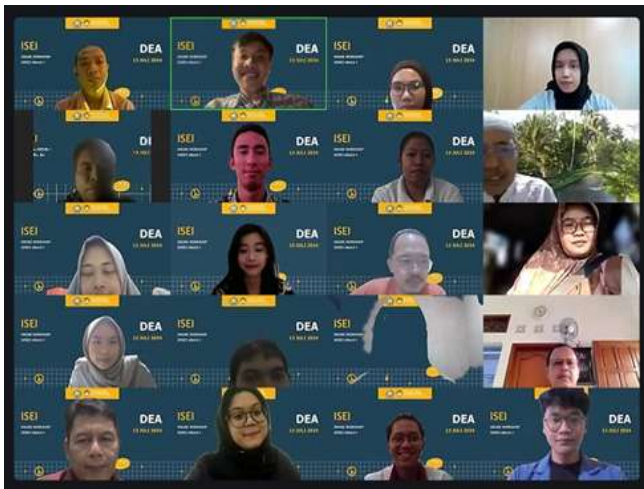
Hal ini menjadi menarik karena Singapura menempatkan *event* tidak berdiri sendiri namun menawarkan “*Singapore Experience*” dan pada *lesson learned* dampak Swiftonomics di Singapura telah memberikan *multiplier effect* melebihi kontrak eksklusif sebesar US\$2-3 juta yang membuat Taylor Swift hanya melakukan konser di Singapura. Pada penyelenggaraan *F1 Powerboat World Championship* Danau Toba menunjukkan adanya *behavioral intension* baik dari penonton internasional dan domestik. Namun, terdapat beberapa catatan dalam penyelenggaraan *event* tersebut adalah: 1) Perlunya keterlibatan masyarakat lokal; 2) Sosialisasi dan kesiapan masyarakat lokal; 3) Paket wisata yang berbasis *experience*; 4) Infrastruktur telekomunikasi; 5) Pembagian tugas Pemerintah Pusat dan Daerah; 6) Promosi *event*; 7) Keberlanjutan *event* dan pemeliharaan infrastruktur penunjang; dan 8) Memperhatikan budaya dan perilaku penduduk lokal. Penyelenggaraan *event* Seminar Nasional *Eventonomics: Learning from Swiftonomics, Multisport Event, and MICE* di Universitas Bangka Belitung diharapkan dapat menjadi *maingate* bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Investor, dan *Stakeholders* lainnya untuk dapat menangkap peluang berbagai *event* internasional di masa yang akan datang.



Check For Detail

Editor: Jonathan Ersten Herawan

ISEI Workshop Series Batch 1 “Aplikasi Analisis Deterministik dan Stokastik”



Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) bekerjasama dengan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta (FBE UAJY) mengadakan kegiatan ISEI Workshop Series Batch 1 yang kegiatan ini diisi oleh Akademisi dan Ekonom Muda yang berasal dari kampus FBE UAJY. Berdasarkan survei singkat yang dilakukan dalam rangkaian Workshop RStudio, Manajemen Jurnal Ilmiah, dan Analisis Tabel IRIO sebesar 68 persen mahasiswa menganggap perlunya rangkaian workshop yang berisi aplikasi berbagai Alat Analisis Ekonomi (AAE).

Pelatihan ini terbagi dalam enam paket diantaranya:

- 1) Workshop Data Envelopment Analysis yang dibawakan oleh Mario Rosario Wisnu Aji, M.Ec.Dev. (Dosen FBE UAJY) & Mawar Diah Estiana, S.E. (Experienced Asisten Laboratorium Ekonomi FBE UAJY);
- 2) Workshop Analytical Hierarchy Process yang dibawakan oleh Mario Rosario Wisnu Aji, M.Ec.Dev. (Dosen FBE UAJY) & Mawar Diah Estiana, S.E. (Experienced Asisten Laboratorium Ekonomi FBE UAJY);
- 3) Regresi Time Series yang dibawakan oleh Dr. Y. Sri Susilo, S.E., M.Si. (Pengurus Pusat Bidang III PP ISEI & Dosen FBE UAJY) & Laurensius Farel Dwi Putranto, S.E. (1st Place Sumatranomics 2022 & Fraud Analyst BCA);
- 4) Regresi VAR/VECM yang dibawakan oleh Dr. Y. Sri Susilo, S.E., M.Si. (Pengurus Pusat Bidang III PP ISEI & Dosen FBE UAJY) & Fabritio Paulus Kumowal, S.E. (Experienced Asisten Laboratorium Ekonomi FBE UAJY);

5) Regresi Data Panel Statis yang dibawakan oleh Mario Rosario Wisnu Aji, M.Ec.Dev. (Dosen FBE UAJY) & Laurensius Farel Dwi Putranto, S.E. (1st Place Sumatranomics 2022 & Fraud Analyst BCA); dan terakhir

6) Analisis Tabel Input-Output yang dibawakan oleh Yohanes B. Kadarusman, Ph.D. (Pengurus Pusat Bidang III PP ISEI) & Jonathan Ersten Herawan, S.E., CFAP. (1st Place Jogja Economic Forum 2023 & Junior Analyst PP ISEI)

Pelatihan ini telah diikuti oleh 80 peserta dengan pilihan paket yang berbeda bahkan untuk mendukung kegiatan penelitian dan pelatihan yang beretika dan berbudaya, Sekretariat PP ISEI dibantu dengan Laboratorium Ekonomi Komputer FBE UAJY menyediakan E-VIEWS 12 dalam bentuk offline scent file. Instruktur dalam pelatihan ini menggunakan 5 ekonom muda (young economist) yang membuktikan kehandalan dan pengalaman mereka dapat diimplementasikan dalam analisis dan praktikal.

Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh peserta multi stakeholder, tercatat dalam database peserta berasal dari multi institusi seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), PT. Bank Central Asia Tbk., Organisasi KAMSELINDO, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BSIP), Bank Permata, Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN), Presisi Indonesia, dan peneliti dari seluruh Indonesia. Dari hasil penilaian, workshop ini membantu peningkatan dan pemahaman mengenai alat analisis ekonomi yang terus mengalami dinamika perubahan setiap waktunya. Kedepannya, ISEI Workshop Series membuka peluang kerjasama untuk mengadakan kelas pelatihan yang bekerjasama dengan mitra kerja ISEI dan akan mengembangkan alat analisis ekonomi serta topik yang diangkat.



Check For Detail

Editor: Jonathan Ersten Herawan

Diskusi Publik ISEI Cabang Riau “Skema Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Riau”



Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Riau bersama Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Riau menggelar acara diskusi publik pada Kamis (1/8/2024) yang mengambil tema 'Skema Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Riau' bertempat di Aula Lancang Kuning Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Provinsi Riau.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setdaprov Riau, Alzuhra Dini Alinoni. Sedangkan narasumber antara lain Karmila Sari dari anggota DPRD Provinsi Riau, Hasrul dari Kementerian Keuangan, Joan Tampubolon dari PT. Sarana Multi Infrastruktur, Dio Fawwaz Prakoso dari Otoritas Jasa Keuangan, dan moderator adalah Rahmad Rahim, Fungsional Perencana Ahli Utama. Acara ini selain dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus ISEI Riau, juga dihadiri oleh peserta yang berasal dari berbagai kalangan seperti Pemerintah Provinsi Riau, Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, BUMN, BUMD, swasta serta organisasi profesi lainnya.

Herman Boedoyo, Ketua ISEI Riau dalam sambutannya mengatakan “Diskusi Publik ini diadakan dalam rangka memperkuat peran ISEI dalam perumusan kebijakan ekonomi, pengembangan kualitas akademis, riset dan profesionalisme terkait dengan percepatan pembangunan infrastruktur dengan menggunakan pembiayaan non APBN dan APBD. Dari total kebutuhan pendanaan investasi infrastruktur, Pemerintah hanya mampu menyediakan pendanaan yang bersumber dari APBD/APBN sebesar 37%.”

Herman melanjutkan, ada tujuh skema pembiayaan pembangunan infrastruktur yang dimaksud yaitu :

1. Skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU),

2. Skema Hak Pengelolaan Terbatas (HPT),
3. Skema Sovereign Wealth Fund (SWF) yang telah dimandatkan UU Cipta Kerja,
4. Skema Integrated Funding Platform,
5. Skema Land Value Capture (LVC) atau pengelolaan perolehan peningkatan nilai kawasan
6. Pinjaman Daerah : PT. SMI, Obligasi Daerah, sukuk, perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya
7. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau Community Social Responsibility (CSR) dari perusahaan perusahaan yang beroperasi di Provinsi Riau

Karmila Sari, anggota DPRD Riau menyatakan bahwa DPRD siap mendukung program pembangunan infrastruktur yang bersumber dari anggaran di luar APBD asalkan tidak merugikan keuangan daerah dan untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Hasrul dari Kementerian Keuangan memberi saran untuk mempertimbangkan potensi Provinsi Riau, utamanya dalam hal SDA, penyediaan layanan infrastruktur khususnya di sektor transportasi, mampu mengatasi persoalan akses dan keterisolasian sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi hingga pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

Otoritas jasa Keuangan mengingatkan tentang arti pentingnya pembiayaan pembangunan infrastruktur non APBN/APBD bagi daerah yang dapat mempercepat pembangunan yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat waktu yang memberi dampak positif dalam memicu pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan efisiensi produksi, memperluas akses pasar, dan menarik investasi swasta; pembangunan infrastruktur membutuhkan tenaga kerja yang besar, baik dalam tahap konstruksi maupun operasional, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mempermudah mobilitas, akses pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya.

PT. Sarana Multi Infrastruktur mengatakan terdapat delapan sektor operasional yang dapat dibiayai oleh PT SMI, yaitu jalan dan jembatan, transportasi, minyak dan gas, telekomunikasi, pengelolaan sampah, listrik, irigasi, dan penyediaan air minum.

Di akhir kegiatan Rahmad Rahim, moderator menyampaikan saran dan rekomendasi ISEI Riau yang sebaiknya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi

Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota : pertama membentuk Tim Persiapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan alternatif skema pembiayaan yang bertugas untuk menginventarisir infrastruktur strategis yang akan didanai melalui alternatif skema pembiayaan dan menyusun due diligence proposal

usulan proyek infrastruktur dengan berpedoman regulasi yang berlaku; kedua, dalam proses penganggaran agar menghindari pembiayaan yang tidak prioritas yang bukan menjadi tanggung jawab daerah.

Editor: Jonathan Ersten Herawan

Online Workshop "Strategi Go-Digital UMKM Zaman Now"

The poster features a dark blue background with a collage of images showing people and digital devices. On the right side, there are colorful geometric shapes in blue, yellow, and green. The text is white and yellow, providing clear information about the event.

Online Workshop
Strategi Go- Digital
UMKM Zaman Now
"Road to ISEIPRENEUR FESTIVAL"

Link Pendaftaran:
<https://bit.ly/WorkshopUMKMZamanNow>

Welcome Remarks:
Prof. Laode M. Kamaluddin
(Rektor UICI)

Opening Speech:
Yoga Affandi, Ph.D.
(Sekretaris Umum PP ISEI & Direktur Eksekutif BI Institute)

Keynote Speech:
Anastuty Kusumowardhani, M.Ec.
(Kepala Departemen Pengembangan UMKM & Perlindungan Konsumen Bank Indonesia)

Closing Remarks:
Lely Pelitasari Soebekty, S.P., M.E.
(Sekretaris II PP ISEI)

Speaker:
Nida Nurlivi, S.Si., M. Han
(Dosen Prodi Bisnis Digital UICI)
Topik : Menembus Online Marketplace Melalui Brand Image

Speaker:
Ilham Setyawan, M.I.Kom.
(Dosen Prodi Komunikasi Digital UICI)
Topik: Minim Modal, Maksimalkan Visual Produk (Penggunaan AI pada Aplikasi Smartphone Canva dan Capcut)

Moderator:
Izzaty Zephaniah, S.Sos., M.Si.
(Kepala PR & Produksi Konten UICI)

Selasa, 27 Agustus 2024
18.30 - 21.30 WIB

Akses Zoom:
ID: 810 1721 6066
Kode: UICI2024

Contact Person:
0882-2734-8958 (Jonathan)

Logos: PPISEI_Official, isei.or.id, UICI Official, uici.ac.id, (021)2528282

2 Days Workshop Firm Wide Stress Testing: Using Web-App & Mobile App



2-DAY WORKSHOP FIRM-WIDE STRESS TESTING Using Web-App & Mobile App

Sinopsis

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5 Tahun 2024 mengatur tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum. Salah satu yang diatur adalah kewajiban Bank untuk menyusun dan menguji Rencana Aksi Pemulihan secara berkala melalui stress testing. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank memiliki strategi yang efektif dalam menghadapi situasi krisis. ISEI kembali menawarkan Workshop dua hari: "Firm-Wide Stress Testing". Workshop ini sangat sesuai bagi profesional yang ingin mendapatkan pemahaman tentang stress testing yang komprehensif terhadap risiko fundamental termasuk metodologi dan berbagai pemodelan risiko untuk Scenario-Based Stress Testing. Peserta diharapkan dapat melakukan pemodelan dampak economic growth misalnya, atau macro-economic variable lainnya terhadap ODR, NPL atau risk indeks lainnya. Peserta akan mempelajari penggunaan machine learning yang dilengkapi dengan contoh pemodelan real menggunakan program R dalam bentuk web app & mobile app. Selain itu juga peserta juga akan memahami pembuatan scenario menggunakan Monte Carlo Simulation dan juga pembahasan mengenai climate risk stress testing & reverse stress testing.



Fasilitator:

BENNY K. YUDIAATMAJA, FRM

Benny aktif sebagai konsultan pemodelan risiko pasar, *IRRBB*, risiko kredit & risiko operasional dan perancang *software* manajemen risiko di beberapa bank. Benny juga mengajar mata kuliah *Risk Modelling* di Magister Ekonomi Terapan UNIKA Atma Jaya. Benny lulus *cum laude* Sarjana Matematika ITB dan Magister Manajemen Risiko UI. Gelar profesi *international Financial Risk Manager (FRM)* diperoleh dari *Global Association of Risk Profesional (GARP)*.

Agenda Pelatihan

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1 INTRODUCTION TO STRESS TESTING | 5 STRESS TEST - MARKET RISK & IRRBB |
| 2 MEASURES OF CORE RISKS | 6 PERFORMING STRESS TEST - CREDIT RISK |
| 3 RISK MODELLING | 7 PERFORMING STRESS TEST - LIQUIDITY RISK, OpRISK & OTHER RISK |
| 4 STRESS TEST METHODOLOGIES | 8 RISK INTEGRATION, CLIMATE RISK & REVERSE STRESS TEST |



INVESTASI

Rp 3.500.000 (Materi Presentasi, *Spreadsheet* dan *web-based online app* untuk pemodelan *machine learning*, *workshop kits* & E-Certificate)



VENUE

Kantor ISEI Pusat,
JL. Daksa IV No. 09, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan



TIME

Senin & Selasa, 09 - 10 September 2024
Pukul 09.00 - 16.30 WIB



INFORMATION

Peserta diharapkan membawa *notebook* atau tablet yang dapat terhubung dengan internet. Pendaftaran hanya dibuka dengan kapasitas 25 peserta.

Link Pendaftaran: bit.ly/ISEIStressTestingPOJK

Silabus Workshop : bit.ly/ISEIModulStressTestingPOJK



+62-882-2734-8958 (Jonathan)



isei.pusat@gmail.com



[ppisei_official](#)



UNIVERSITAS KRISTEN
DUTA WACANA
YOGYAKARTA



DAFTAR KULIAH TANPA TES? UKDW AJA!

+ Potongan **DPFP** up to **100%**



Pendidikan



Kesehatan



Bisnis



Jalur Penerimaan

PMB 2024/2025

DAFTAR DISINI

pmb.ukdw.ac.id



1 UKDW Prestasi

Hingga
Agustus

2 UKDW SKL

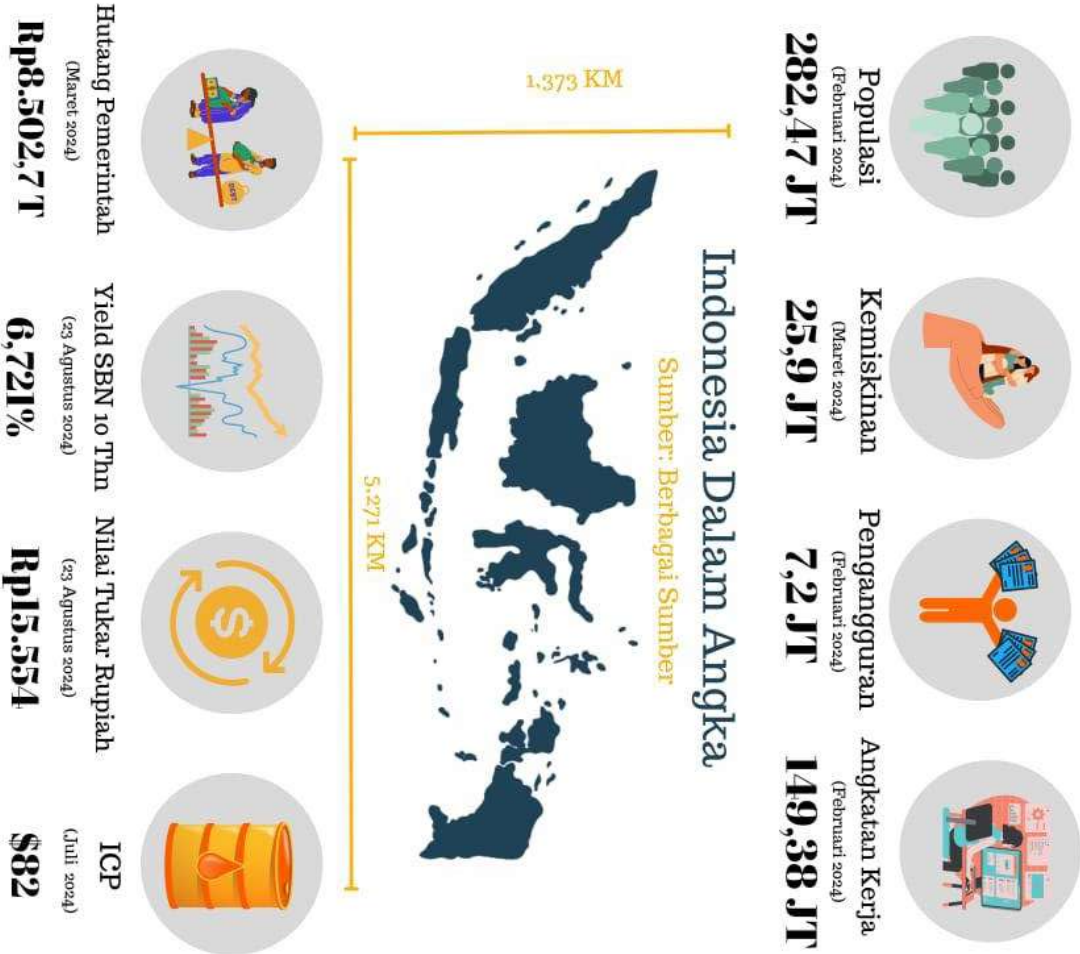
Hingga
September

3 UKDW UTBK

Hingga
September

kata Mama
UKDW aja!

Statistik Ekonomi Nasional (SENAS)



Sumber: Berbagai sumber (diolah)
Penghimpun Data: Jonathan (+62-882-2734-8958)

Statistik Ekonomi Daerah (SEKDA)

Provinsi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Gini Ratio	Presentase Penduduk Miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka	IPM	Impor Non- Migas Juta US\$	Ekspor Non- Migas Juta US\$	Nilai PMDN Miliar Rupiah
ACEH	4,54	2,51	0,294	14,23	5,56	73,4	24,3	226,2	2.123,4
SUMATERA UTARA	4,95	2,06	0,297	7,99	5,1	73,37	1.833,3	3.883,3	6.368,8
SUMATERA BARAT	4,71	2,44	0,283	5,97	5,79	73,75	68,6	732,7	1.535,1
RIAU	3,7	2,22	0,307	6,67	3,85	74,04	719,5	5.980,2	18.553,7
JAMBI	4,15	2,14	0,321	7,1	4,45	72,77	13	378,1	1.754,1
SUMATERA SELATAN	4,96	1,87	0,333	10,97	3,97	71,62	959,3	2.126,8	10.310,6
BENGKULU	4,7	2,31	0,342	13,56	3,17	72,78	0	83,6	1.124,1
LAMPUNG	4,8	2,55	0,302	10,69	4,12	71,15	620,6	1.714,4	1.992
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1,03	0,84	0,244	4,55	3,85	72,85	0,9	390,7	3.059,2
KEPULAUAN RIAU	4,9	2,81	0,349	5,37	6,94	77,11	5.812,6	6.070,4	2.054,8
DKI JAKARTA	4,9	1,97	0,423	4,3	6,03	82,46	39.071,5	4.559,3	35.280,8
JAWA BARAT	4,95	2,25	0,421	7,46	6,91	73,74	1.607,2	14.847,7	23.569
JAWA TENGAH	4,92	1,86	0,367	10,47	4,39	73,39	3.251,9	4.357	9.313,5

Provinsi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Gini Ratio	Presentase Penduduk Miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka	IPM	Impor Non- Migas Juta US\$	Ekspor Non- Migas Juta US\$	Nilai PMDN Miliar Rupiah
JAWA TIMUR	4,98	2,13	0,372	9,79	3,74	73,38	9.147,8	9.980,8	20.069
BANTEN	4,7	2,3	0,353	5,84	7,02	73,87	4.137,5	5.045,2	10.216,9
BALI	5,36	2,53	0,361	4	1,87	77,1	64,5	276,8	4.985,2
NUSA TENGGARA BARAT	11,06	1,91	0,361	12,91	3,3	70,2	612,5	1.411,7	6.349
NUSA TENGGARA TIMUR	4,35	0,85	0,316	19,48	3,17	66,68	23,4	29,5	529,5
KALIMANTAN BARAT	4,76	1,58	0,31	6,32	4,2	69,41	275,5	746,8	3.651,4
KALIMANTAN TENGAH	3,8	1,28	0,301	5,17	3,67	72,2	23,5	1.803,6	2.880,6
KALIMANTAN SELATAN	4,81	1,85	0,302	4,11	3,89	72,5	89	4.883,2	5.401,9
KALIMANTAN TIMUR	5,85	2,18	0,321	5,78	5,75	78,2	513,6	9.380,6	11.926,5
KALIMANTAN UTARA	4,6	1,98	0,264	6,32	4,01	72,49	455,6	688,7	3.008,5
SULAWESI UTARA	5,13	4,03	0,36	7,25	5,98	74,36	28,1	332,7	1.195,9
SULAWESI TENGAH	9,75	2,45	0,301	11,77	3,15	70,95	4430	7.766,1	887,1
SULAWESI SELATAN	4,98	1,74	0,363	8,06	4,9	73,46	421,5	823,8	1.757,2

Provinsi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Gini Ratio	Presentase Penduduk Miskin	Tingkat Pengkangan Terbuka	IPM	Impor Non- Migas Juta US\$	Ekspor Non- Migas Juta US\$	Nilai PMDN Miliar Rupiah
SULAWESI TENGGAHA	5,54	1,73	0,37	11,21	3,22	72,79	497,8	1.669,4	1.125,20
GORONTALO	3,82	3,07	0,414	14,57	3,05	70,45	18,9	17,6	614,9
SULAWESI BARAT	4,3	2,08	0,354	11,21	3,02	67,55	0	171,9	1.121,90
MALUKU	3,12	2,71	0,282	16,05	5,96	70,94	7,8	29,4	707,3
PROV MALUKU UTARA	10,76	2,96	0,316	6,32	4,16	70,21	1.545,8	4.119,6	1.774,30
PAPUA BARAT	21,11	2,83	0,389	21,66	4,31	66,66	7,7	10,7	266,4
PAPUA BARAT DAYA		1,77	0,346	18,13	6,02				468,5
PAPUA	4,37	0,91	0,362	17,26	5,81	62,25	4,6	34,6	155,8
PAPUA SELATAN		1,2	0,404	17,44	4,75				34,7
PAPUA TENGAH		4,16	0,381	29,76	2,49				171
PAPUA PEGUNUNGAN		5,09	0,34	32,97	1,18				15,6
INDONESIA	5,11	2,13	0,379	9,03	4,82	73,55		117.19 1.7	197.10 6.70
	Q-2 tahun 2024*)	Juli 2024*)	Semester I - 2024*)	Semester I - 2024*)	Februari 2024*)	Tahun 2023*)	Jan - Mei 2024*)	Jan - Mei 2024*)	Q-1 tahun 2024

Sumber: Berbagai Sumber (diolah)

PERKEMBANGAN SEKTOR PERBANKAN (PBKN)

INTERMEDIASI		PERKEMBANGAN SEKTOR PERBANKAN (PBKN)	
		PROFITABILITAS	
		Mei 2024	Juni 2024
Kredit (Rp T)			
	Mei 2024	7.376	7.478
	% YoY	12,15	12,36
DPK (Rp T)	% Ytd	4,03	5,47
		8.699	8.722
	% YoY	8,63	8,45
LDR	% Ytd	2,85	3,12
		84,8	85,74
PERMODALAN			
		Mei 2024	Juni 2024
CAR (%)		26,17	26,18
KREDIT RESTRU COVID-19			
		Mei 2024	Juni 2024
Kredit Restru Covid-19		192,52	181,14

PERKEMBANGAN SEKTOR PERASURANSIAN, PENJAMINAN & DANA PENSUNAN (PPDP)

ASURANSI		ASURANSI	
ASURANSI KOMERSIAL		PROGRAM PENSUN SUKARELA	
		Mei 2024	Juni 2024
Nilai Aset (Rp T)		907,39	372,7
Nilai Premi Asuransi Komersial (Rp T)		165,18	17,49
ASURANSI NON KOMERSIAL			
Nilai Aset (Rp T)		218,87	1.075,58
Nilai Premi Asuransi Non Komersial (Rp T)		89,1	53,04
TOTAL ASET ASURANSI		Juni 2024	Juni 2024
Nilai Aset (Rp T)		1.126,26	1.448,28
		% YoY	1,14%

Sumber: OJK RI (2024)
Penghimpun Data: Jonathan

PERUSAHAAN PENJAMINAN		PERUSAHAAN PENJAMINAN	
		Mei 2024	Juni 2024
Nilai Aset (Rp T)		47,29	4,37
Nilai Imbal Jasa Penjaminan (Rp T)			



WARTA ISEI

EDISI OKTOBER

Warta ISEI merupakan publikasi yang membahas fenomena atau isu hangat, penting, dan perkembangan terkini yang ditulis dalam karya tulis populer.

Ketentuan Naskah

- Berisi 800-1.000 kata.
- Menggunakan pedoman PUEBI.
- Berbentuk dokumen word dengan font Tahoma, size 12, single-spaced pada kertas bentuk A4 dengan margin halaman 3 cm.
- Dapat melampirkan gambar yang terkait dengan konten naskah.

Tema Naskah

“Optimalisasi Potensi Desa Berbasis Hilirisasi Komoditas Unggulan Daerah.”

Pengiriman Naskah

warta@isei.or.id

Deadline: 10 Oktober 2024

Contact Person



+62 821-1273-4541 (Firman S.P.)



@ppisei_official

Template Naskah



bit.ly/publikasiwartaisei

Tertarik Beriklan di Warta ISEI?



bit.ly/MediaOrderWartaisei



Sinergi dan Kolaborasi
Pusat dan Daerah

WARTA ISEI

VOLUME 1

NO. 2

AGUSTUS 2024



IKATAN SARJANA EKONOMI INDONESIA

Gedung Kantor Pusat ISEI

Jl. Daksa IV No.9, Jakarta 12110

Telp. : (021) 2277 2577

Fax : (021) 720 1812

Email : isei.pusat@gmail.com

Instagram : [ppisei_official](https://www.instagram.com/ppisei_official)

Linkedin : Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia

<https://isei.or.id/>